



SPORT

Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Hajar Bangladesh 9-2

Oleh Redaksi · 1 Okt, 21.41 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA – Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Mitchell Baker menjadi bintang kemenangan Indonesia dengan mencetak lima gol. Empat gol

lainnya masing-masing disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks.

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-11 setelah Ole Romeny mengirim umpan dari sisi kanan yang diselesaikan Baker melalui tendangan mendatar ke pojok bawah gawang Bangladesh.

Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Bangladesh, penyerang Indonesia itu melepaskan penyelesaian dari jarak dekat untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Tekanan Indonesia terus berlanjut. Pada menit ke-32, Rizky Ridho memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan melepas-

kan tembakan kaki kanan yang bersarang di sudut bawah gawang Bangladesh.

Bangladesh sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-36 melalui sundulan Shahriar Emon.

[Selengkapnya di halaman 21 »](#)

NASIONAL

Presiden Prabowo Bongkar Kabinet Merah Putih! Listyo Sigit Masuk Istana, Ini Daftar Lengkapnya



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih.

Listyo Sigit kini masuk Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

Sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

NASIONAL

Gugatan PHPU Gibran di MK dan Potensi Diskualifikasi



BANDA ACEH -Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohonan tersebut diajukan sejumlah pihak, di antaranya Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sejumlah pur-nawirawan TNI.

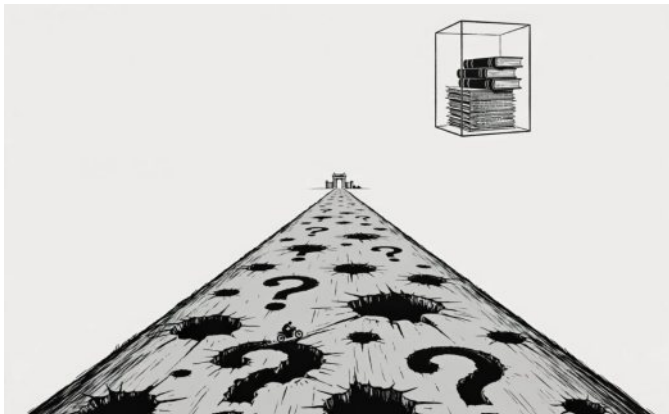
[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	16
LIFESTYLE	19
Aneka Berita	21

OPINI

Dari Cot Iri ke Limpok: Skripsi Tertunda Karena Stang Motor Bangkok



Saya bukan mahasiswa hukum. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kesehariannya lebih akrab dengan

diksi dan tata bahasa ketimbang pasal dan ayat.

[Selengkapnya di halaman 21 »](#)

NASIONAL

Dr Tifa Kecewa Jokowi Tak Hadir di Sidang, Pertanyakan Pemeriksaan Saksi



BANDA ACEH - Terdakwa dr Tifauzia Tyassuma merasa janggal dengan sidang dugaan ijazah palsu Joko Widodo beragenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Dalam sidang ini, seharusnya yang dihadirkan adalah Joko

Widodo yang memperkarakan pernyataan dr Tifa di sejumlah media massa atas tuduhan ijazah palsu.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

LIFESTYLE

Double Job! Kekayaan Bahlil Tembus Rp344,41 Miliar



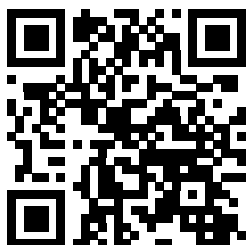
BANDA ACEH -Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis, 1 Oktober 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dengan jabatan baru tersebut, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri ESDM.

[Selengkapnya di halaman 19 »](#)

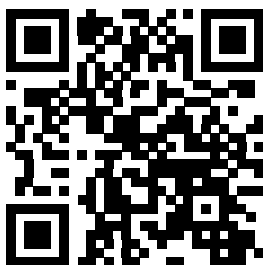
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dr Tifa Kecewa Jokowi Tak Hadir di Sidang, Pertanyakan Pemeriksaan Saksi

Oleh Redaksi · 1 Okt, 21.12 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa dr Tifauzia Tyassuma merasa janggal dengan sidang dugaan ijazah palsu Joko Widodo beragenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Dalam sidang ini, seharusnya yang dihadirkan adalah Joko Widodo yang memperkarakan pernyataan dr Tifa di sejumlah media massa atas tuduhan ijazah palsu.

Tifa pun merasa kecewa karena saksi dan pelapor yang memberikan keterangan sidang hari ini adalah Lechumanan bukan Joko Widodo.

"Sebelum melakukan pemeriksaan saksi atau JPU melakukan pemanggilan saksi, harusnya pelapor dulu. Kita tahu semua bahwa pelapor pertama adalah Saudara Joko Widodo. Tapi ternyata JPU tidak berhasil mendatangkan Joko Widodo. Karena itu yang didatangkan adalah tiga pelapor yang lain, yaitu Lechumanan, Maruap Samuel Swaken, dan Andi Kurniawan," ujarnya, Kamis.

Dari tiga saksi itu, kata Tifa, hanya dua Lechumanan dan Maret Samuel Sueken. Masih ada satu saksi yang belum memberikan keterangan yaitu Maret Samuel Sueken.

Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Saksi

Tifa mengaku menyiapkan 2.000 pertanyaan kepada para saksi yang memberikan keterangan hari ini. Sebab sidang tertunda karena jam makan siang dan ia baru mengajukan dua pertanyaan.

"Mudah-mudahan majelis hakim mengizinkan kita untuk menyelesaikan semua pertanyaan kami, ya. Dari pertanyaan yang sedikit saja, kita bisa melihat betapa rancunya proses persidangan ini," ungkap Tifa.

Wanita berhijab abu-abu ini menilai, dalam persidangan tadi ada perdebatan antara kuasa hukumnya dengan JPU dan majelis hakim PN Jakarta Timur.

Soroti Barang Bukti Berupa US Selain soal saksi, dr Tifa menyoroti perdebatan yang terjadi antara

tim kuasa hukumnya, JPU, dan majelis hakim.

Menurut dia, salah satu persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan barang bukti dari saksi pelapor.

Dr Tifa menyebut barang bukti tersebut berupa klipng dan tangkapan layar, bukan unggahan asli yang ditampilkan secara langsung dalam persidangan.

"Karena kalau memang itu adalah postingan di akun atau postingan di media sosial, atau sebuah video di YouTube, maka di persidangan itu harus ditunjukkan secara aktif, bukan dari USB," ujarnya.

Ia kemudian menyampaikan penilaiannya terhadap penggunaan USB tersebut sebagai barang bukti.

"Jadi, USB yang disampaikan oleh saksi itu tidak sah sebagai alat bukti, menyalahi undang-undang," tandasnya.

Pernyataan mengenai keabsahan barang bukti tersebut merupakan pandangan dari pihak terdakwa

dan masih menjadi bagian dari proses persidangan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanjutkan sidang terdakwa dr Tifauzia Tyassuma atas dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Palsu, Kamis (1/10/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan dakwaan yang dibuat untuk dr Tifauzia Tyassuma atas tuduhan ijazah S1 Presiden Joko Widodo adalah palsu.

Salah satu JPU dihadapan Majelis Hakim PN Jakarta Timur menyatakan, atas tuduhan itu mengakibatkan Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu pencemaran nama baik secara personal.

"Saksi merasa telah dihina sehinahinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir. H.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Gugatan PHPU Gibran di MK dan Potensi Diskualifikasi

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.44 WIB



BANDA ACEH -Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan tersebut diajukan sejumlah pihak, di antaranya Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sejumlah purawirawan TNI.

Pengamat hukum dan Politik, Muhammad Gumarang mengatakan, gugatan terhadap pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan dan dugaan cacat administrasi atau prosedur berpotensi berujung pada diskualifikasi.

"Hal itu, apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan," kata Gumarang dalam keterangannya, Kamis 1 Oktober 2026.

Permohonan itu tercatat di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, meski permohonan diajukan hampir dua tahun setelah pemilu berlangsung.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemohon adalah terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Dalam laman resmi MK, PMK tersebut mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026.

"PMK Nomor 1 Tahun 2026 merupakan bentuk terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum atau *rechts vacuum* serta memenuhi asas *ius curia novit*, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas," kata Gumarang.

Dalam perkara yang kini diperiksa MK, masih kata Gumarang, Pemohon meminta agar proses

pencalonan Gibran dinilai kembali dari aspek persyaratan administrasi.

Para Pemohon juga menyatakan terdapat bukti yang menurut mereka dapat menunjukkan adanya persoalan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan.

Menurut Gumarang, perkara tersebut menjadi ujian bagi MK dalam menentukan batas kewenangannya terhadap sengketa hasil Pemilu yang diajukan setelah melewati tenggat waktu normal.

MK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, termasuk agenda pembuktian para pihak pada akhir September hingga awal Oktober 2026.

"Wapres Gibran tidak boleh menikmati atau mengambil keuntungan atas pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri sebagaimana asas hukum *nullum commodum capere potest de injuria sua propria*," tuturnya.

Meski demikian, masih kata Gumarang, persoalan hukum tersebut berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.

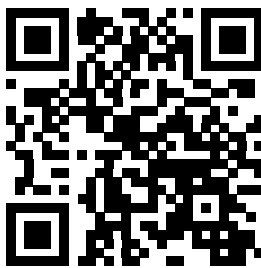
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR atas usul DPR setelah adanya proses pemeriksaan dan putusan MK terkait dugaan pelanggaran hukum atau kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Putusan MK nantinya merupakan putusan hukum, bukan putusan politik. Apabila tuntutan pemohon diterima dan pencalonan Gibran didiskualifikasi, maka harus dilihat lebih lanjut bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentiannya sesuai konstitusi," demikian Gumarang.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

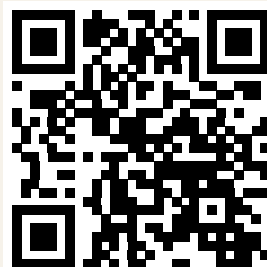
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Presiden Prabowo Bongkar Kabinet Merah Putih! Listyo Sigit Masuk Istana, Ini Daftar Lengkapnya

Oleh Redaksi · 1 Okt, 21.03 WIB



Presiden Prabowo Subianto. FOTO/Biro Pers.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih.

Listyo Sigit kini masuk Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

Sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Salah satu perubahan yang langsung menjadi sorotan adalah masuknya mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke lingkungan Istana.

Listyo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Pergantian tersebut sekaligus membuat posisi Kapolri ikut berubah.

Jabatan yang sebelumnya diemban Listyo Sigit kini ditempati Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Rangkaian pelantikan ini menjadi bagian dari perubahan susunan pejabat negara untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Sejumlah posisi strategis juga mengalami perubahan.

Di tingkat kementerian koordinator, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sugiono juga bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sementara itu, Dudung Abdurachman yang sebelumnya menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan kini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Perubahan juga terjadi di sejumlah kementerian teknis.

Sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan Muhammad Sarmuji dipercaya sebagai Menteri Perindustrian.

Di Kementerian Keuangan, dua nama dilantik sebagai wakil menteri, yakni Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirmanto.

Sementara di sektor pertanian, Saleh Mustafa dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Posisi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ditempati Irwan Meilano.

Selain itu, Prabowo juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.

Perubahan turut menyentuh lembaga pengawasan dan badan otorita.

Aryanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan, sedangkan Muhammad Fadhil Imran dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Berikut daftar menteri dan pejabat setingkat yang dilantik Prabowo pada Kamis (1/10/2026):

- Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Sugiono – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Dradjad Hari Wibowo – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- Arrmanatha Nasir – Menteri Luar Negeri.
 - Muhammad Sarmuji – Menteri Perindustrian.
 - Nurkholisoh Ibnu Aman – Wakil Menteri Keuangan.
 - Luky Alfirmanto – Wakil Menteri Keuangan.
 - Saleh Mustafa – Wakil Menteri Pertanian.
 - Irwan Meilano – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - Listyo Sigit Prabowo – Kepala Staf Kepresidenan.
 - Dedy Prasetyo – Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.
 - Aryanto Wibowo – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan.
 - Muhammad Fadhil Imran – Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Perombakan ini membuat susunan Kabinet Merah Putih kembali berubah di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo.
- Masuknya Listyo Sigit ke Istana juga menjadi salah satu perubahan yang paling mencuri perhatian dalam pelantikan kali ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Saksi Ungkap Uang Fee Haji untuk Gus Yaqut USD2.500 Per Jemaah

Oleh Redaksi · 1 Okt, 17.17 WIB



BANDA ACEH — Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 mengungkap adanya permintaan uang komitmen fee kepada eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Fee tersebut diduga ditarik dari PIHK, agar jemaah bisa mendapatkan kuota tambahan jalur cepat (tanpa antrian). Penarikan ini dikoordinasikan melalui staf khusus dan pejabat di Kementerian Agama.

Staf Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Juahir menyebut, besaran fee awalnya diinformasikan sebesar USD4.000 per jemaah.

Menurutnya, informasi mengenai fee tersebut diterimanya dari Budi Darmawan, yang sebelumnya mendapat informasi dari Kasubdit pada Kementerian Agama, Agus Shafi'i.

"Lebih tepatnya mungkin saya dengar, Pak. Waktu itu mungkin dari Kasubdit," kata Juahir saat bersaksi di persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Jaksa pun membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Juahir.

"Izin Ibu Ketua (Hakim), kami bacakan angka se-huruf selanjutnya. Ada huruf J, konfirmasi saja Saudara saksi, ya," jelas Jaksa KPK.

"Ya" singkat Juahir.

Selanjutnya, Agus Shafi'i memberitahu ke Budi Darmawan bahwa terdapat informasi dari Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, bahwa lantai 2 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, nanti kita sama-sama konfirmasi, Pak.

"Lantai 2 (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) meminta uang fee sebesar 4.000 per jemaah, diberikan nanti saja setelah haji 2024 selesai. Kemudian Budi Darmawan menyampaikan informasi tersebut kepada saya. Informasi ini selanjutnya saya sebarkan kepada seluruh anggota asosiasi.

Juahir pun mengakui BAP tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski begitu, Juahir meminta koreksi, dana komitmen

fee tersebut dimintakan kepada anggota asosiasi yang mengajukan kuota haji tambahan bukan seluruh anggota asosiasi.

"Mungkin perlu dikoreksi, Pak. Jadi saya menyampaikan dana komitmen fee itu, ya yang itu, itu kepada yang datang saja, Pak. Bukan seluruh anggota asosiasi, Pak," ungkapnya.

Menurut Juahir, informasi fee tersebut kemudian disampaikan kepada anggota asosiasi yang mengajukan permohonan kuota tambahan. Ia menegaskan informasi itu tidak disebarluaskan kepada seluruh anggota asosiasi.

"Untuk yang mengajukan saja," ujarnya.

Juahir mengatakan, mayoritas anggota yang menerima informasi awal kemudian menyetorkan USD4.000 per jemaah. Namun, belakangan muncul informasi bahwa besaran fee yang sebenarnya diminta hanya USD2.500 per jemaah.

Atas perbedaan informasi itu, Juahir meminta Budi Darmawan mengonfirmasi langsung kepada Agus Shafi'i.

"Seingat saya beliau menyatakan iya, Pak," kata Juahir ketika ditanya apakah Budi kemudian mengonfirmasi kepada Agus Shafi'i.

Menurut Juahir, hasil konfirmasi tersebut menyebutkan besaran fee yang diminta adalah USD2.500 per jemaah, bukan USD4.000.

"Angkanya tidak kurang tidak lebih di angka 2.500, Pak, per pax," ujarnya.

Meski begitu, Juahir mengungkapkan sebagian besar anggota HIMPUPH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji) sudah telanjur menyetor USD4.000. Setelah muncul konfirmasi mengenai angka USD2.500, sebagian anggota kemudian menyetor sesuai nominal tersebut.

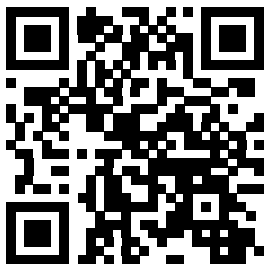
"Karena informasi awal disampaikan 4.000, Pak, mayoritas menyetor 4.000. Tapi kemudian hari karena ada konfirmasi ulang, sebagian ada yang setor 2.500," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

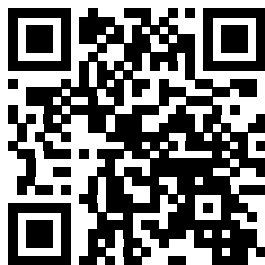
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Copot Agus Gumiwang, Prabowo Lantik Sarmuji Jadi Menteri Perindustrian

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.03 WIB



BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan Menteri Perindustrian baru ini menggantikan posisi Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menjabat sejak era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hingga Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pengumuman resmi pelantikan Sarmuji disampaikan langsung oleh Deputy Bidang Administrasi Aparatur Sekretariat Negara (Setneg), Nanik Purwanti, dalam prosesi pelantikan di Istana Negara. “Muhammad Sarmuji sebagai menteri perindustrian,” demikian bunyi pengumuman resmi tersebut. Pelantikan Sarmuji sebagai Menperin berlangsung bersamaan dengan rangkaian pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya pada hari yang sama, termasuk pelantikan Kapolri baru dan Wakil Menteri Keua-

Sarmuji sendiri mengaku baru mendapatkan kepastian terkait jabatan barunya pada pagi hari sebelum pelantikan berlangsung. Kehadirannya di Istana Negara sebelumnya sempat memunculkan spekulasi publik mengenai posisi apa yang akan diembannya dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Sosok Muhammad Sarmuji bukan nama baru di panggung Politik nasional. Sebelum menjabat Menteri Perindustrian, ia aktif sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut, yakni 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2026, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur VI. Jabatan terakhirnya di parlemen adalah Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bidang yang dinilai relevan dengan tugas barunya di Kementerian Perindustrian.

Dari sisi latar belakang pendidikan, Menteri Perindustrian Sarmuji menempuh seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di Jawa Timur, mulai dari SDN Medokan Ayu 270 Surabaya (lulus 1986), SMPN 17 Surabaya (1989), hingga SMAN 16 Surabaya (1992). Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Manajemen, Universitas Jember (Unej), dan lulus pada tahun 2000, sebelum menempuh pendidikan pascasarjana bidang ilmu administrasi di Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 2005.

Selama masa kuliah di Universitas Jember, Sarmuji dikenal aktif berorganisasi, antara lain sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa Unej periode 1996-1998 dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember periode 1998-2000. Rekam jejak organisasinya berlanjut di tingkat nasional sebagai Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional Pengurus Besar HMI (2001-2002), Wasekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI

(2003-2009), Ketua KNPI (2008-2011), hingga Sekjen PP Angkatan Muda Partai Golkar/AMPG (2010-2015).

Di jalur karier profesional, Sarmuji sempat bekerja sebagai konsultan di PT Himais Optima (2002-2010) sambil aktif sebagai tenaga ahli Fraksi Partai Golkar DPR RI (2007-2014). Ia juga pernah menjabat komisaris di PT Manggala Karya Cipta (2008-2014) dan PT Eco Sejahtera (2011-2014). Di internal Partai Golkar, jenjang kariernya terus menanjak, mulai dari Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan DPP Partai Golkar (2014-2019), Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur (2019-2024), hingga akhirnya dipercaya menduduki posisi puncak sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sejak 2024.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Menteri Kontroversial Juga Perlu Diganti

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.33 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Pergantian tersebut mencakup sejumlah posisi menteri, pejabat setingkat menteri, hingga pimpinan lembaga dan institusi negara.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai evaluasi terhadap menteri seharusnya juga menyasar terhadap menteri yang menimbulkan kontroversi. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Publik berharap ini bukan reshuffle yang terakhir kalinya di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran,” kata Adi, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ia mengatakan, hal-hal yang bersifat kontroversial dan menimbulkan persepsi kurang baik terhadap kinerja pemerintah semestinya menjadi bahan evaluasi, termasuk kemungkinan pergantian menteri.

“Publik tentu berharap hal-hal yang sifatnya kontroversial dan menimbulkan persepsi kurang baik terkait dengan kinerja menteri, saya kira penting untuk dilakukan evaluasi bahkan pergantian,” ujarnya.

Adi menyinggung sejumlah menteri yang namanya muncul dalam perkara hukum. Ia menyebut, isu yang mengaitkan menteri dengan dugaan suap maupun persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut dikhawatirkan menjadi beban Politik bagi pemerintahan apabila tidak segera ditangani.

“Khawatir ini menjadi beban, khawatir ini jadi sesuatu yang kurang positif,” sambungnya.

Dua nama menteri Kabinet Merah Putih sukses menjadi headline publik dalam beberapa pekan terakhir. Sayangnya bukan karena prestasi maupun gebrakan kebijakan akar rumput yang dikeluarkan, melainkan irisan ke kasus hukum.

Kedua anak buah Presiden Prabowo Subianto dimaksud adalah Raja Juli Antonio selaku Menteri Kehutanan dan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baik Raja Juli maupun Nusron muncul pada perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menhut Raja Juli dikaitkan dengan perkara dugaan gratifikasi pengurusan kawasan hutan di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Sementara nama Nusron disebut-sebut dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski berdasarkan penanganan terbaru dari KPK belum ada kaitan langsung ke Nusron, beberapa orang dekat dan anak buah politisi Golkar ini sudah menyandang status tersangka.

Adi berharap evaluasi terhadap jajaran kabinet tidak hanya didasarkan pada capaian kinerja, tetapi juga mempertimbangkan persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan.

“Tentu kita berharap menjelang 20 Oktober, sekitar tiga minggu lagi, akan ada reshuffle selanjutnya, terutama kepada siapapun yang terindikasi bukan hanya soal kinerja tapi terindikasi terkait persoalan yang dikaitkan dengan hukum,” tandasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

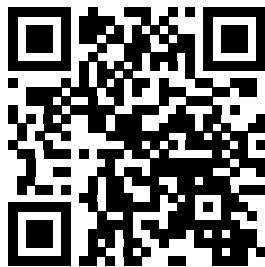
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ijazah Gibran Dibedah di MK, Pasal Titipan Mulai Tercium?

Oleh Redaksi · 1 Okt, 12.51 WIB



Oleh:Rosadi Jamani

MUNGKIN banyak tak mengikuti live sidang ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) tadi malam. Baiklah saya coba resensi, materi apa yang ramai dibedah oleh para pakar hukum, saksi dari pemohon. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Tengah malam, ketika rakyat normal sudah tidur dan ayam baru menyiapkan tenggorokan untuk berkokok, MK malah berubah menjadi panggung sirkus hukum. Tiga ahli dan satu saksi eks komisioner KPU tampil seperti peserta reality show, “Siapa Paling Mampu Membuat Hakim Mengangguk Sambil Menahan Tawa?”

Titi Anggraini datang membawa koper argumen. Ia menjelaskan, legalisasi salinan bukti kelulusan dan pengakuan kesetaraan itu bukan barang kembar. Mukanya mungkin mirip, tetapi fungsi beda planet. Yang satu membuktikan seseorang lulus SMA sederajat.

Yang satu lagi hanya surat keterangan, pendidikan tersebut dianggap setara. Jadi, nama program pendidikan tinggi saja, kata Titi, tidak otomatis membuktikan seseorang tamat SMA.

Lalu muncul Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini seperti jin keluar dari botol. Calon yang sekolah di luar negeri tetapi sudah memiliki ijazah perguruan tinggi dikecualikan dari bukti kelulusan SMA. Pertanyaannya, mengapa dulu masyarakat sipil tidak menggugat pasal ini?

Jawabannya agak kocak. Publik sedang sibuk menggugat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia. Akibatnya, pasal penyetaraan lewat begitu saja. Persis tukang bakso lewat depan rumah ketika kita sedang serius menonton Dracin. Pas sadar, baksonya sudah belok tiga gang.

Kemudian naik panggung I Gusti Putu Artha, eks komisioner KPU. Aura ruang rapat, kopi

hitam, dan map dokumen langsung terasa. Ia menegaskan verifikasi dokumen syarat capres-cawapres harus dilakukan secara langsung, bukan model “ceklis, beres, pulang”.

Ia mengingatkan praktik 2009. Bahkan ijazah SD dan SMP harus diperlihatkan. Pernah pula ia mencoret caleg anak pejabat gara-gara persoalan ijazah. Pesannya sederhana. Dulu verifikasi bisa sekeras itu, mengapa sekarang jangan sampai berubah menjadi ritual administrasi?

Putu Artha juga menyinggung rentannya KPU terhadap intervensi pihak tertentu yang ingin mengubah aturan pemilu. Sampai muncul istilah “pasal titipan”. Namanya saja sudah bikin curiga. Terdengar seperti paket misterius yang dikirim tengah malam, “Wak, jangan dibuka dulu. Ini titipan.”

Bivitri Susanti kemudian memperjelas arena pertarungannya. Menurut penjelasannya, perkara ini bukan ranah pemakzulan melau

lui MPR. MK memiliki kewenangan untuk mengoreksi hasil pemilu dan melakukan diskualifikasi elektoral. Jadi bukan drama perceraian Politik. Ini lebih mirip koreksi lembar ujian. Kalau ada jawaban keliru, jangan cuma bilang, “Sudahlah, sudah terlanjur dikumpulkan.”

Di sebelah mereka ada Yance Arizona, ahli hukum tata negara, seolah siap menjadi wasit ketika semua orang mulai berdebat tentang siapa paling konstitusional.

Sekarang republik menunggu episode berikutnya. Sidang selanjutnya dijanjikan menghadirkan pembuktian dari pihak KPU. Bagian ini siapkan Koptagul dan pisang goreng, wak!

Sebab kalau malam ini sudah begini, kita tidak tahu besok akan muncul apa. Bisa saja ada yang berkata dokumen diverifikasi lewat telepati, pasal lahir dari ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Bahlil Dilantik Jadi Menko Hilirisasi dan Energi, Rangkap Jabatan Menteri ESDM

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.09 WIB



BANDA ACEH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Energi pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta. Bahlil membenarkan dirinya mendapat arahan langsung untuk mengemban jabatan baru tersebut sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.

“Saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM, kita jalankan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil saat dikonfirmasi awak media di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Saat ditanya kesiapannya mengemban dua jabatan sekaligus sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil menyatakan kesanggupannya menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. “Insya Allah kita menjalankan amanah dari Pak Presiden untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kehadiran Bahlil di Istana Negara pada hari yang sama bersamaan dengan agenda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Tampak hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, hingga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Energi merangkap Menteri ESDM

ini menjadi bagian dari dinamika penyesuaian kabinet Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menandai penguatan koordinasi kebijakan di sektor hilirisasi dan energi nasional, dua isu strategis yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.

Sosok Bahlil Lahadalia sendiri bukan nama asing di jajaran kabinet maupun dunia usaha nasional. Pria kelahiran Kepulauan Banda, Maluku, 7 Agustus 1976 ini memiliki latar belakang sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia Politik dan pemerintahan. Riwayat pendidikannya diawali dengan menempuh S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, dilanjutkan S2 di Universitas Cenderawasih, dan S3 di Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil dikenal aktif sejak masa kuliah sebagai pengurus senat mahasiswa, hingga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan mencapai posisi puncak sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) HMI. Saat ini beliau menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Rekam jejak organisasi dan pengalamannya di dunia usaha inilah yang kerap disebut menjadi bekal penting dalam menjalankan berbagai jabatan strategis di pemerintahan, termasuk tugas barunya mengoordinasikan kebijakan hilirisasi dan energi nasional.

Dengan rangkap jabatan baru ini, Bahlil Lahadalia akan memiliki peran ganda yang strategis: mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang hilirisasi dan energi melalui posisinya sebagai Menko, sekaligus tetap menjalankan eksekusi teknis kebijakan energi dan sumber daya mineral melalui posisinya sebagai Menteri ESDM.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

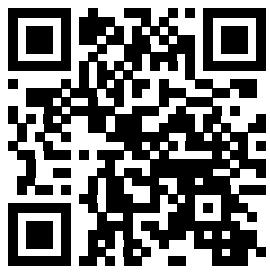
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Siapa Sangka dari Kapolsek Pasar Minggu, Suyudi Ario Seto jadi Orang Nomor Satu di Polri

Oleh Redaksi · 1 Okt, 13.16 WIB



BANDA ACEH - Perjalanan karier Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., di kepolisian berlangsung panjang.

Dari memimpin kepolisian di tingkat sektor sebagai Kapolsek Metro Pasar Minggu, ia kemudian menapaki berbagai jabatan strategis, mulai dari kapolres, pejabat di Bareskrim, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kini, perjalanan tersebut membawanya ke tahap baru.

Suyudi diajukan sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada Rabu (1/10/2026), Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI.

Dalam proses tersebut, ia memaparkan visi dan arah pembenahan Polri, termasuk gagasan "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai tema kepemimpinannya hingga 2029.

Jika melihat ke belakang, posisi yang kini dihadapinya tentu berbeda jauh dengan awal perjalanan kepemimpinannya.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) 1994. Ia lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Kariernya dimulai dari lingkungan reserse Polda Metro Jaya.

Ia pernah bertugas sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya sebelum kemudian dipercaya memimpin sejumlah kepolisian sektor di wilayah Jakarta.

Salah satu jabatan penting pada fase awal kariernya adalah Kapolsek Metro Pasar Minggu.

Setelah itu, Suyudi dipercaya menjadi Kapolsek Metro Tanah Abang dan Kapolsek Metro Penjarangan. Dari level kepolisian sektor, kariernya kemudian terus bergerak ke tingkat yang lebih tinggi.

Ia kemudian dipercaya mengemban sejumlah jabatan reserse, antara lain Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan,

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Memasuki periode 2014 hingga 2017, Suyudi mendapat kepercayaan sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan berbagai persoalan penegakan hukum di tingkat kewilayahan.

Setelah cukup lama berkutat di lapangan, Suyudi kemudian masuk ke lingkungan Bareskrim Polri.

Di Bareskrim, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus serta Wakil Direktur Tindak Pidana Siber.

Pengalaman tersebut memperluas rekam jejaknya dari penanganan kejahatan konvensional hingga perkara ekonomi khusus dan kejahatan berbasis teknologi.

Kariernya terus meningkat. Pada 2023, Suyudi dipercaya menjadi Wakapolda Metro Jaya. Seta-

hun kemudian, tepatnya pada Juni 2024, ia dilantik sebagai Kapolda Banten.

Namun, masa jabatannya sebagai Kapolda Banten tidak berlangsung lama. Pada Agustus 2025, Suyudi dimutasi sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di luar struktur.

Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan baru kepadanya untuk memimpin BNN.

Presiden Prabowo melantik Suyudi sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2025. Ia menggantikan Komjen Pol. Marthinus Hukom.

Pelantikan itu sekaligus membawa Suyudi ke lembaga yang memiliki tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Respons Jokowi soal Parpol Koalisi Diam terkait Gugatan Keabsahan Gibran di MK

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.53 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons santai dinamika gugatan keabsahan pencalonan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi juga tidak ambil pusing terkait sikap partai Politik koalisi pengusung yang terkesan diam dan tidak memberikan pembelaan terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2026).

Saat ditanya mengenai sikap partai-partai koalisi yang pasif menghadapi sidang gugatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa seluruh pihak sebaiknya menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan di lembaga peradilan konstitusi. "Semuanya kita ikuti proses yang ada di Mahkamah, kita ikuti," ujar Jokowi di kediamannya, Kamis (1/10/2026).

Mengenai tuntutan dari pihak pelapor yang meminta agar status Gibran sebagai Wakil Presiden dianulir, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim MK.

"Terkait permintaan agar dianulir, itu kan proses hukum. Jadi

yang memiliki kewenangan adalah Mahkamah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut merespons tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur serta ragu atas keabsahan dokumen pendidikan putra sulungnya. Sambil tertawa ringan, Jokowi kembali merincikan jejak pendidikan Gibran mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di luar negeri.

Jokowi menjelaskan, Gibran menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 16 Surakarta dan SMP Negeri 1 Surakarta. Memasuki jenjang setara SMA, Gibran melanjutkan studi ke Orchid Park Secondary School di Singapura, mengambil O-Level, hingga masuk ke UTS Insearch.

"Ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS (Management Development Institute of Singapore) di Singapura. Jadi jelas semuanya," papar Jokowi.

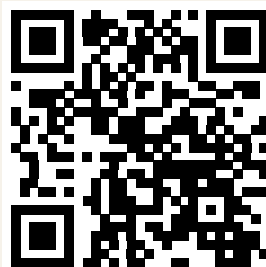
Jokowi pun menyentil pihak-pihak yang mempermasalahkan persyaratan administrasi pencalonan Gibran padahal seluruh berkas telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nyatanya persyaratannya diterima oleh KPU. Ya masa sudah sekolah di luar negeri suruh ikut Paket C lagi?" kata Jokowi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

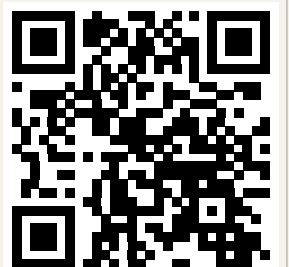
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jeritan Penumpang Pecah, Saat Pilot Flydubai FZ1073 Ditikam

Oleh Redaksi · 1 Okt, 10.22 WIB



Tangkap Layar Instagram

BANDA ACEH - -- Jeritan penumpang pecah di dalam kabin Flydubai FZ1073 ketika pesawat tiba-tiba mengalami penurunan ketinggian secara drastis dalam penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv, Rabu (30/9/2026). Situasi yang awalnya berlangsung normal berubah menjadi kepanikan ketika pesawat Boeing 737 itu dilaporkan turun sekitar 16.000 hingga 17.000 kaki hanya dalam waktu sekitar dua menit. Pesawat kemudian mengirimkan kode darurat yang mengindikasikan adanya keadaan serius hingga sempat memunculkan dugaan pembajakan. Dalam kondisi tersebut, sejumlah penumpang dilaporkan menendang masuk ke kokpit untuk membantu mengamankan situasi dan memastikan pesawat tetap dapat dikendalikan. Rangkaian kejadian itu akhirnya berujung pada pendaratan darurat di Bandara Prince Sultan bin Abdulaziz, Tabuk, Arab Saudi. Pesawat Flydubai FZ1073 diketahui berangkat dari Bandara Internasional Dubai sekitar pukul

03.05 GMT atau sekitar 07.05 waktu setempat. Pesawat kemudian menanjak menuju ketinggian jelajah sekitar 34.000 kaki. Selama penerbangan, situasi awalnya berjalan normal. Namun, sekitar dua jam setelah lepas landas, data pelacakan menunjukkan adanya perubahan ketinggian yang tidak biasa. Sekitar pukul 05.21 GMT, pesawat mengalami penurunan ketinggian tajam. Pesawat sempat kembali menanjak sebelum kembali mengalami penurunan drastis. Beberapa menit kemudian, situasi semakin serius. Pada sekitar pukul 05.28 GMT, transponder pesawat mengirimkan kode 7700. Dalam penerbangan sipil, kode tersebut merupakan sinyal keadaan darurat umum. Enam menit berselang, sekitar pukul 05.35 GMT, kode transponder berubah menjadi 7500. Kode 7500 merupakan kode internasional yang digunakan untuk menunjukkan adanya intervensi melawan hukum terhadap

sebuah pesawat, termasuk dugaan pembajakan. Perubahan kode tersebut langsung memicu respons keamanan karena pesawat diketahui membawa banyak warga negara Israel. Di tengah situasi tersebut, informasi mengenai apa yang terjadi di dalam kokpit mulai terungkap. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan salah seorang pilot menyerang dan menikam pilot lainnya. Pilot yang terluka kemudian disebut masih berusaha membuka akses menuju kokpit sehingga awak kabin dan penumpang dapat masuk untuk membantu mengendalikan keadaan. Seorang penumpang bernama Yaniv Hayoun mengatakan dirinya bersama penumpang lain menyadari adanya masalah di bagian depan pesawat. Mereka kemudian bergerak menuju kokpit. Ketika pintu kokpit terbuka, mereka melihat salah seorang pilot terluka, sementara pilot lainnya berada di sekitar panel kendali.

Menurut kesaksian Hayoun, pilot yang diduga menyerang rekannya berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya mengakses kendali pesawat. Hayoun kemudian masuk ke kokpit dan berusaha menjauhkan pilot tersebut dari panel kendali. Ia bersama orang lain membantu mengamankan pelaku sebelum awak pesawat mengambil alih kendali penerbangan. "Saya berteriak kepada mereka untuk lari dan mengambil kendali pesawat," demikian kesaksian yang disampaikan terkait situasi tersebut. Dalam laporan Reuters, Hayoun juga menceritakan bahwa dirinya berusaha menahan penyerang dan menariknya menjauh dari panel kendali. Pada saat yang sama, pesawat sempat mengalami penurunan ketinggian yang sangat cepat. Laporan menyebut ketinggian pesawat turun sekitar 16.000 hingga 17.000 kaki hanya dalam waktu sekitar dua menit. » Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Sidang Dokter Tifa, Kuasa Hukum Desak JPU Tunjukkan Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.56 WIB



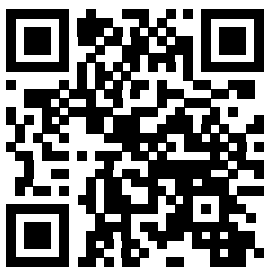
BANDA ACEH - Tim kuasa hukum terdakwa Tifauzia Tyasuma alias Dokter Tifa meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di persidangan. Permintaan tersebut muncul saat sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (1/10/2026). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU, yakni Lechumanan. Dalam persidangan, tim hukum Dokter Tifa menanyakan kepada Lechumanan yang juga disebut ikut melaporkan perkara tersebut apakah dia pernah melihat langsung ijazah Jokowi. "Apakah Saudara pernah melihat ijazah Jokowi?" tanya tim hukum Dokter Tifa. "Pernah," jawab Lechumanan. "Pernah lihat langsung?" tanya tim hukum kembali. "Langsung," kata Lechumanan. Mendengar jawaban tersebut, tim hukum Dokter Tifa meminta izin kepada majelis hakim agar JPU menunjukkan ijazah Jokowi. Dokumen tersebut hendak dikonfirmasi kepada saksi untuk memastikan apakah ijazah yang ditunjukkan merupakan dokumen yang pernah dilihatnya. "Majelis, mohon Jaksa untuk menunjukkan ijazahnya untuk kami konfirmasikan apakah ijazah

itu yang dilihat. Silakan, JPU," kata tim hukum Dokter Tifa. Namun, JPU menilai permintaan tersebut tidak relevan dengan kapasitas Lechumanan sebagai saksi. "Mohon izin, Majelis Hakim. Ini tidak ada relevansinya dengan keterangan saksi ini, sesuai dengan Pasal 214 ayat 7. Terima kasih," ucap JPU. Perbedaan pendapat tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang sidang. Tim hukum Dokter Tifa tetap meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan, sedangkan majelis hakim meminta pihak terdakwa mengikuti proses pembuktian yang berlangsung. "Gini ya, silakan pembuktian dari Penuntut Umum, Terdakwa juga membuktikan. Nanti kami yang menyimpulkan. Saudara tidak perlu memaksa apa yang ada di persidangan ini, gitu. Berpendapat, memberikan kesimpulan, ya," kata Hakim Ketua Christina Endarwati. Perkara Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Sidang perkara tersebut kembali berjalan setelah pada Juli 2026 majelis hakim sebelumnya mengabulkan eksepsi Dokter Tifa dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

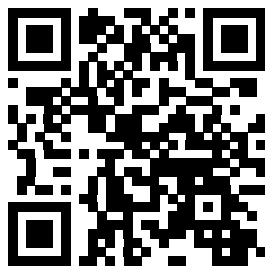
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Oleh Redaksi · 1 Okt, 08.46 WIB



BANDA ACEH -Kesaksian saksi yang dihadirkan Denny Indrayana, selaku Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Perkara Nomor 001/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyebut tidak ada bahasa atau frasa verifikasi faktual dalam pemeriksaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Saksi yang dihadirkan Denny ialah mantan Anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha di Ruang Sidang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu malam, 30 September 2026.

Kuasa Hukum KPU RI yang hadir dalam persidangan menanyakan soal bukti empiris yang Putu telah sampaikan dalam persidangan, terkait apakah saat sebelum Pemilu 2024 terdapat kejadian dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan verifikasi.

"Pak Putu ini kan ikut (menjadi penyelenggara pemilu di) Pilpres 2009. Pertanyaan saya, sepengetahuan saudara saksi, Pemilu 2004 Pemilu 2009, atau yang saudara saksi ikuti 2014 misalkan, apakah saudara saksi tahu untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, pernah saksi tahu tidak dilakukan verifikasi berkaitan dengan ijazah," tanya Kuasa Hukum KPU.

Jawaban Putu, mengarah pada penegasan yang ada diregulasi tentang perbedaan antara verifikasi dokumen syarat peserta pemilu, yaitu antara partai Politik (parpol) dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Saya tidak sependapat dengan istilah verifikasi faktual, karena regulasi hanya mengatakan, kalau istilah administrasi dan faktual dalam proses kebenaran dokumen di partai politik menjadi peserta pemilu, clear," urainya.

"Tetapi bahasa hukum di Undang-Undang Pemilu Presiden, di Undang-Undang Pemilu dan

turunannya di Peraturan KPU, yang ada adalah KPU wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen. Clear, itu bahasa undang-undang juga sama," sambung Putu menjelaskan.

Akan tetapi menurut tafsirannya, frasa tersebut bukan berarti verifikasi dokumen atau data syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan secara faktual.

"Maka pemahaman hukum saya terhadap kebenaran dokumen ini, ya memang harus didatangi gitu. Masak kita harus percaya, bahwa ini dokumen benar gak milik menteri pendidikan? Kalau tidak kemudian didatangi," tuturnya.

Tak sampai di situ, Putu kembali dicecar pertanyaan oleh Kuasa Hukum KPU, tentang pengalamannya saat penyelenggaraan pemilu di masa masih menjabat melakukan verifikasi faktual dokumen syarat capres-cawapres dengan terjun langsung ke lapangan.

"Khusus Pilpres ya, di 2009, Pak Putu pernah melakukan verifikasi mendatangi gitu, ijazah-ijazah para calon-calon presiden dan wakil presiden atau tidak?" katanya bertanya.

"Kalau saya ketika itu jadi ketua pokja Debat dan pokja kampanye, maka tanggung jawab untuk kemudian melakukan verifikasi dan mendatangi itu ada pada tim," ungkapnya.

Di samping itu, Putu menyampaikan argumentasi penguatnya, dengan menyebut tugas verifikasi ke lapangan tidak harus dilakukan oleh komisioner, tetapi bisa dilakukan jajaran yang ada pada pokja atau divisi kerja terkait.

"Saya ingin mengatakan tidak harus tujuh orang (komisioner KPU) ini datang, karena di situ ada pokja. Maka pertanyaan ini sebetulnya menarik, nanti dicek siapa sebetulnya yang dapat tugas di pokja yang Pilpres ini ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Buni Yani: Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.41 WIB



BANDA ACEH -Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis 1 Oktober 2026 menjadi sinyal dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian penegasan peneliti media dan Politik Buni Yani kepada RMOL, Kamis 1 Oktober 2026.

Menurut Buni Yani, dengan pergantian Kapolri, maka MK tidak akan ragu-ragu lagi dalam memutuskan gugatan mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama KIPP dan Partai Ummat terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) soal keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

"Presiden Prabowo seperti ingin mengatakan, "Hai MK, teruskan pekerjaanmu dengan benar, Gibran memang harus didiskuali-

fikasi karena tidak memenuhi syarat", " kata Buni Yani.

Buni Yani menilai, pergantian Kapolri ini untuk mengantisipasi keamanan ketika nanti MK mengabulkan permohonan Denny Indrayana cs.

"Sebab keamanan sudah sepenuhnya berada di bawah kontrol Prabowo, bukan lagi di bawah Sigit yang merupakan Geng Jokowi," kata Buni Yani.

Selain itu, lanjut Buni Yani, pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026, yang merupakan Hari Kesaktian Pancasila, seolah menjadi sebuah simbol komitmen Prabowo untuk secara tegas memutuskan diri dari pengaruh Jokowi.

Sebelumnya, pada Rabu malam, 30 September 2026, dimulai pembuktian ijazah Gibran di MK.

"MK perlu dukungan yang kuat, baik dukungan intelektual, moral, maupun politik, agar berani, yakin, dan firm dalam memutuskan perkara ini," kata Buni Yani.

NASIONAL

Akhirnya Dirjen Pas Mashudi Mundur Buntut Sengkarut Lapas Cibinong

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.36 WIB



BANDA ACEH -Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Akbar Hadi, mengatakan surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.

"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," kata Akbar dalam keterangan resmi.

Pengunduran diri itu disampaikan sebagai bentuk pertanggungja-

waban moral atas peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.

Akbar memastikan pengunduran diri Mashudi tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas, khususnya di bidang pemasyarakatan.

"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," tegasnya.

Kemenimipas juga memastikan layanan dan pelaksanaan tugas organisasi tetap menjadi prioritas selama proses administrasi pengunduran diri berlangsung.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Klaster Mewah Lapas Cibinong Dibongkar,Tapi Penghuninya Masih Misterius

Oleh Redaksi · 1 Okt, 09.01 WIB



BANDA ACEH - Sepuluh bangunan yang sempat menjadi sorotan dan disebut sebagai klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong kini sudah dibongkar. Tetapi, perkarnya belum ikut selesai. Asal-usul biaya pembangunan dan siapa saja yang pernah menikmati fasilitas di dalamnya masih belum terjawab terang.

Pembongkaran dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) menggunakan alat berat dan dipimpin Direktur Jenderal Pemasarakatan Mashudi.

Di balik pembongkaran itu, terdapat persoalan mengenai status bangunan. Kemenimipas menyatakan 10 bangunan tersebut tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), tidak berasal dari anggaran APBN, dan tidak memiliki izin.

"Ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan," tegas Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan.

Rudi menyebut bangunan itu dibuat secara swadaya. Namun, ia belum menjelaskan siapa yang

mengeluarkan biaya, bagaimana dana dihimpun, dan berapa uang yang digunakan untuk membangunnya.

Persoalan ini pertama kali muncul setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. Saat itu, Ombudsman menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan rumah tangga.

Di kawasan yang sama juga ditemukan tempat kebugaran dan simulator golf yang masih dalam pembangunan.

Pihak Lapas Cibinong sebelumnya menyebut ada 13 rumah dinas di lokasi tersebut. Tiga untuk pimpinan, satu sebagai mess, sedangkan lainnya digunakan kepala seksi dan petugas kesehatan.

"Di sini ada 13 rumah dinas. Ada rumah dinas Kasi Kamtib, rumah dinas pejabat lain, dokter, perawat, dan petugas lainnya," ujar Kepala KPLP Lapas Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra.

Namun, pemeriksaan kemudian menemukan 10 bangunan tidak

masuk dalam daftar BMN. Bangunan itu juga disebut tidak dibangun menggunakan anggaran APBN.

Penjelasan mengenai kapan dan bagaimana bangunan tersebut berdiri pun ikut menjadi sorotan.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9/2026), Kepala Urusan Umum Lapas Cibinong, Deni, mengatakan 13 rumah tersebut dibangun pada 2023 dan selesai pada April tahun yang sama.

Pembangunan itu berlangsung ketika Usman Madjid menjabat Kalapas Cibinong pada periode 2021-2023, sebelum digantikan Wisnu Hani Putranto.

Menurut Deni, pembangunan berawal dari kunjungan Bupati. Saat itu, izin secara lisan diberikan untuk menjalankan inisiatif Kalapas membangun rumah dinas pegawai. Pembangunan kemudian berjalan sembari proses surat izin dilakukan.

"Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mengizin membuat

rumah dinas pegawai Bapak," kata dia.

Rumah-rumah tersebut kemudian langsung ditempati setelah selesai dibangun pada April 2023. Surat keputusan mengenai penempatan rumah dinas selanjutnya dibuat dan ditandatangani Kalapas. Namun, penjelasan itu belum mengurai siapa pihak yang secara resmi menggagas pembangunan maupun siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaannya.

Saat ditanya Komisi XIII mengenai sumber dana pembangunan 13 rumah tersebut, Deni mengaku tidak mengetahuinya karena baru menjabat sebagai Kaur Umum.

Ombudsman juga masih menelusuri asal-usul anggaran pembangunan fasilitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya urunan dari warga binaan.

Siapa yang Menghuni?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Gantikan Djamari Chaniago, Dudung Dilantik Jadi Menko Polkam

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.28 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan dilakukan secara khidmat di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026). Sesi pelantikan dimulai sekitar pukul 14.28 WIB.

Dudung Abdurachman tampak berdiri di jajaran para pejabat yang mengisi jabatan yang telah ditentukan di depan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengenakan setelan formal dengan jas serta peci hitam, dilengkapi dasi yang tampak dominan berwarna biru. Dudung kemudian mengucapkan sumpah janji yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh dirinya bersama para pejabat lain.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengucapkan sumpah janji, para pejabat, termasuk Dudung, tampak dipersilakan ke depan meja guna menandatangani berita acara pengambilan sumpah bersama Presiden Prabowo.

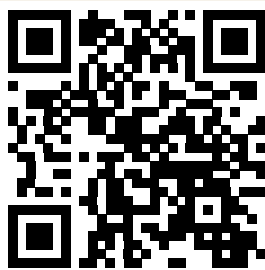
Sebelumnya, Dudung sendiri menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Ia dilantik sebagai KSP pada Senin, 27 April 2026 lalu. Melansir dari laman resmi Universitas Trisakti, Dudung Abdurachman lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1988 dan pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 17 November 2021 hingga 25 Oktober 2023. Tercatat, ia berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Trisakti pada 2023 dengan predikat cum laude dalam Manajemen Strategis.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

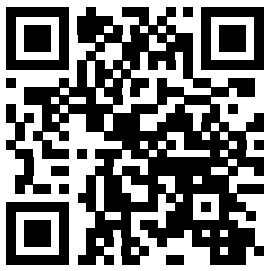
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Hakim MK Tolak Gibran-Menkum Dihadirkan di Sidang Ijazah, Diganti Pemberi Keterangan Lain

Oleh Redaksi · 1 Okt, 20.49 WIB



BANDA ACEH - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Hakim Saldi Isra dalam lanjutan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

"Tidak menerima usulan atau permintaan dari pemohon berkenaan dengan menghadirkan pihak-pihak yang dimaksud di kedua surat itu," kata Saldi, Kamis (1/10/2026).

Meski menolak permohonan tersebut, MK akan menghadirkan

pemberi keterangan lain dalam persidangan. Sidang untuk mende- ngarkan keterangan tersebut akan digelar pada Jumat (2/10/2026) pukul 09.00 WIB.

"Meskipun demikian, kami akan menghadirkan pemberi keterangan lain yang besok sidangnya akan diselenggarakan pukul 09.00 WIB," tuturnya.

Saldi tidak merinci sosok pem- beri keterangan yang akan dihadir- kan maupun jumlahnya. Namun, dia memastikan pihak yang dimaksud telah dihubungi oleh MK dan diharapkan hadir dalam persidangan.

Mahkamah menilai pemberi keterangan yang akan dihadirkan merupakan sosok yang ketera- ngannya paling diperlukan. Mah- kamah juga menegaskan bahwa

pihak yang dihadirkan ini bukan untuk kepentingan pemohon.

"Pihak-pihak yang akan mem- berikan keterangan itu sudah kami hubungi insya Allah besok akan bersedia hadir. Itu pihak yang menurut Mahkamah diperlukan oleh mahkamah, bukan untuk kepentingan pemohon," ucapnya.

Sebelumnya, Permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabu- ming Raka dihadirkan dalam per- sidangan diajukan pemohon per- kara Nomor 01/PHPU.PRES- XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kuasa hukum pemohon, Bam- bang Widjojanto, sebelumnya menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pihaknya

telah mengirim surat permohonan pada 28 September 2026 agar Gibran dipanggil untuk memberik- kan keterangan dalam tahap pem- buktian. Selain Gibran, pemohon juga meminta MK menghadirkan Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum.

"Izin majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohon- an kepada Ketua MK, Jakarta 28 September. Permohonan pemang- gilannya untuk didengar ketera- ngannya di tahap pembuktian," kata Bambang dalam sidang yang digelar Rabu (30/9/2026).

"Ada saudara Gibran Rakabu- ming Raka, Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum. Sudah ada suratnya, kami mohon dipertim- bangkan untuk dipanggil," katanya

NASIONAL

Reshuffle ke-7 Kabinet Prabowo: Pratikno Tumbang, Listyo Sigit Naik Kasta

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.40 WIB



BANDA ACEH - Presiden Pra- bowo Subianto kembali mengocok ulang Kabinet Merah Putih. Res- huffle ketujuh di era pemerinta- hannya ini digelar di Istana Kepre- sidenan Jakarta, Kamis (1/10) siang.

Sebanyak delapan pejabat baru resmi dilantik dan diambil sum- pahnya. Pelantikan ini berlandas- kan Keputusan Presiden No. 104/P/2026 tentang pemberhen- tian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, serta Keppres No. 105/P/2026 tentang pemberhen- tian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Nama paling disorot dalam res- huffle kali ini adalah Menko Pem- bangunan Manusia dan Kebuda- yaan (PMK) Pratikno yang harus lengser. Posisinya digantikan Sugi- ono, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Pergantian juga terjadi di pucuk Polri. Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Pra- bowo. Tak dibuang, Listyo Sigit justru ditarik ke lingkaran inti Istana sebagai Kepala Staf Kepre- sidenan (KSP).

Ini menjadi reshuffle ketujuh Prabowo. Reshuffle sebelumnya baru terjadi bulan lalu, saat Pra- bowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keua- ngan dan mengangkat Wakilnya, Suahasil Nazara, sebagai Menkeu pada 14 September 2026.

Berikut Daftar Lengkap Peja- bat yang Dilantik 1 Oktober 2026:

- Menteri Koordinator & Men-
teri:**
- Menko Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia
 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Sugiono
 - Menko Politik dan Keamanan (Polkam): Dudung Abdurachman
 - Menteri Luar Negeri (Menlu): Arrmanatha Nasir
 - Menteri Perindustrian (Menpe- rin): M. Sarmuji

- Wakil Menteri Koordinator &
Wakil Menteri:**
- Wamenko Perekonomian: Drajat Hari Wibowo
 - Wamenkeu: Luky Alfirman & Nurkholish Ibnu Amman
 - Wamentan: Muhamad Soleh Mustofa
 - Wamen KKP: Irwan Meilano

- Kepala & Wakil Kepala Badan /
Lembaga:**
- Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo
 - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional: Dedi Prasetyo
 - Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa: Fadil Imran
 - Wakil BPKP: Arianto Wibowo

- Ombudsman RI:**
- Ketua: Nuzran Joher
 - Anggota: Radyan Sam

- Kepolisian RI:**
- Kapolri: Suyudi Ario Seto
 - Wakapolri: Wahyu Hadiningrat. DW

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

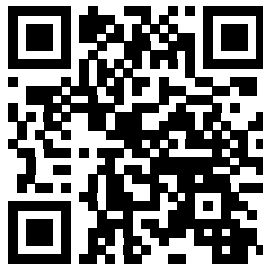
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Diam-diam Takut? Jokowi Terbaca Selalu Lakukan Ini Jelang Sidang Ijazah

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.20 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 98 Rustam Effendi menyoroti aktivitas Joko Widodo (Jokowi) setiap kali agenda persidangan atau pemanggilan berkaitan dengan isu ijazah mendekat.

Ia mengaku melihat pola tertentu dari agenda mantan Presiden tersebut yang menurutnya patut diperhatikan.

Rustam menyebut setiap kali jadwal persidangan semakin dekat, selalu muncul agenda blusukan atau kunjungan kerja ke luar daerah.

Misalnya, dalam agenda sidang terdakwa Dokter Tifa pada Kamis (17/9) lalu, Jokowi berada di NTT menemui warga terdampak gempa.

"Setiap mau ada agenda sidang, pasti dibuat acara blusukan atau agenda kunjungan kerja. Hal itu

seolah menjadi pola rutin untuk menghindari hadir secara langsung di persidangan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rustam ketika membahas perkembangan isu keabsahan ijazah Jokowi dalam tayangan wawancara dan diskusi publik di kanal YouTube Langkah Update.

Ia juga mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan bersama rekan-rekan aktivis untuk mengawal persoalan tersebut.

Rustam mengatakan laporan yang diajukan bersama Rizal Fadillah dan Heru telah dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Metro Jaya.

Menurut dia, laporan tersebut kini berkaitan dengan upaya mengungkap pihak yang mereka duga membuat dokumen yang dipersoalkan.

Polda Metro Jaya memang telah memulai penyelidikan atas pengaduan tersebut pada September 2026.

Selain menyoroti agenda Jokowi, Rustam mengaku telah menyampaikan nama dan inisial sejumlah saksi kepada penyidik.

Ia berharap kepolisian memanggil pihak-pihak tersebut untuk dimintai keterangan sehingga perkara dapat diuji secara terbuka.

"Kami sudah menyerahkan data dan poin-poin penting kepada penyidik. Harapan kami, pihak kepolisian berani memanggil semua saksi kunci yang terlibat agar status hukumnya menjadi terang benderang dan transparan bagi publik," ungkapnya.

Rustam juga menceritakan temuannya dengan seseorang yang

diklaim sebagai sepupu dekat Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku menanyakan keberadaan dokumen ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.

"Saya sempat bertanya langsung kepada sepupunya soal keberadaan ijazah tersebut. Jawabannya disampaikan secara santai, yang makin menguatkan keyakinan kami untuk terus mengawal isu ini sampai tuntas," kata Rustam.

Ia menegaskan Tim Pemburu Ijazah Palsu (TPIP) akan terus mengikuti proses laporan tersebut di Polda Metro Jaya.

Rustam berharap penyelesaian perkara dilakukan melalui pembuktian hukum sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang selama ini menjadi polemik.

NASIONAL

Dari Menlu ke Menko PMK, Sugiono Dilantik Gantikan Pratikno

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.33 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak (reshuffle) Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Di antara pejabat yang dilantik, Prabowo mengangkat Sugiono sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang baru untuk sisa masa jabatan 2024-2029, menggantikan Pratikno.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 104/P/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

"Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ungkap Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti dalam acara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Pejabat Negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sugiono, pria kelahiran Aceh Tengah, 11 Februari 1979, adalah politikus Partai Gerindra dan mantan perwira militer. Sebelum menjabat Menko PMK, ia dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Luar Negeri.

Secara akademis, Sugiono merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan V. Ia juga menempuh pendidikan Teknik Komputer di Norwich University, Amerika Serikat (AS), dan menyelesaikan Magister Bisnis di University of Konstanz, Jerman, seperti dikutip dari laman Gerindra.

Dalam karier politiknya, Sugiono terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I pada 2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi. Sebelumnya, terhitung sejak 2014, ia telah menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

NASIONAL

Lengser dari Kapolri, Listyo Sigit Ditunjuk Prabowo Jadi KSP

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.00 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), bersamaan dengan sejumlah agenda pergantian pejabat pemerintahan. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan pejabat.

Setelah keputusan dibacakan, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Listyo Sigit. Dalam sumpah tersebut, Sigit menyatakan komitmennya untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan

perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.

"Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo saat memandu sumpah jabatan.

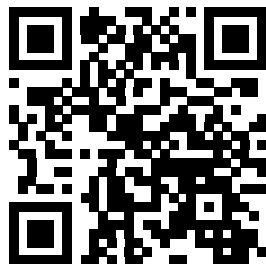
Perpindahan posisi tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. DPR sebelumnya menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Sigit.

Sementara itu, Dudung Abdurachman diangkat Prabowo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (*)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Pernah Jadi Menkopolhukam, Mahfud Bilang Fasilitas Mewah Tak Hanya di Lapas Cibinong

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.23 WIB



BANDA ACEH - Fasilitas Mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong tidak hanya dilihat sebagai persoalan di satu lokasi. Terdapat dugaan bahwa hal tersebut hanyalah bagian puncak gunung es dari persoalan besar di Indonesia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga masih ada fasilitas serupa di lembaga pemasyarakatan lain.

Mahfud menilai persoalan di lapas telah muncul berulang kali sejak lama. Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya memeriksa Lapas Cibinong, tetapi melakukan evaluasi yang lebih luas.

"Ini saya yakin di tempat lain masih banyak lho yang begitu-begitu tuh," jelas Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD, dikutip Kamis (1/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dalam inspeksi tersebut, mereka menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai mewah di balik jeruji lapas.

Anggota Ombudsman RI Syaf-rida Rachmawati Rasahan menyebutkan adanya bangunan yang dihuni beberapa warga binaan dan disebut sebagai "klaster mewah". Di area tersebut terdapat lebih dari 10 rumah dan beberapa mobil mewah.

Ketika Ombudsman berhasil masuk ke salah satu bangunan, ditemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta sejumlah perlengkapan lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida.

Ombudsman juga menemukan fasilitas fitness yang disebut lengkap. Bahkan, pembangunan simulator golf tengah dilakukan di area tersebut.

Selain persoalan fasilitas, inspeksi juga menemukan celah keamanan. Akses keluar di bagian

belakang rumah-rumah petak disebut tidak terkunci dan memiliki jalur yang terhubung dengan hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Dalam wawancara, salah satu penghuni juga disebut mengakui telah membayar sejumlah uang untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap fasilitas yang diterima warga binaan. Apalagi ketika fasilitas tersebut berbeda jauh dari kondisi umum warga binaan dan diduga diperoleh melalui pembayaran tertentu.

NASIONAL

Profil Arrmanatha Nasir, Menlu RI Baru Gantikan Sugiono

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.31 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri RI menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Jabatan Menlu RI tersebut resmi diemban Arrmanatha setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026).

Pria yang akrab disapa Tata itu sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri di Kabinet Merah Putih sebelum naik sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Luar Negeri.

Berikut profil Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI Kabinet Prabowo-Gibran

Pria dengan nama lengkap Arrmanatha Christiawan Nasir ini lahir di Bangkok, Thailand pada 30 Desember 1971.

Arrmanatha menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Buckingham, Inggris, kemudian

melanjutkan jenjang S2 di Leices-ter dan Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri, Arrmanatha membangun karier diplomasinya dari Sekretaris kedua dan negosiator Organisasi Perdagangan Dunia.

Kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Urusan Multilateral Kementerian Luar Negeri RI.

Kariernya kemudian menanjak, menjadi sekretaris kedua Perutusan Tetap Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.

Tak lama berselang, ia didapuk menjadi Sekretaris Pertama PTRI untuk PBB di New York.

Arrmanatha juga sempat mencicipi jabatan Dubes Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monako, dan Unesco.

Sebelum ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, jabatan terakhir Arrmanatha yakni Duta Besar Indonesia untuk PBB.

Ia juga pernah mendapat penghargaan kehormatan dari pemerintah Perancis Legion d'Honneur 2021.

NASIONAL

Tak Lagi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Sebut Statusnya di Polri Masih Aktif hingga 2027

Oleh Redaksi · 1 Okt, 17.07 WIB



BANDA ACEH - Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan statusnya di Polri setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Dia menegaskan masih berstatus aktif sebagai anggota Polri.

"Statusnya masih aktif," kata Jenderal Sigit saat ditanya apakah sudah pensiun atau belum usai tak jabat Kapolri, Kamis (1/10/2026).

Listyo Sigit menjelaskan masa pensiunnya belum tiba. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Polri, dia baru memasuki masa pensiun pada 2027.

"Ya masih lanjut saja. Kan pensiun saya masih 2027," ujarnya.

Listyo Sigit sebelumnya resmi tidak lagi menjabat Kapolri sete-

lah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

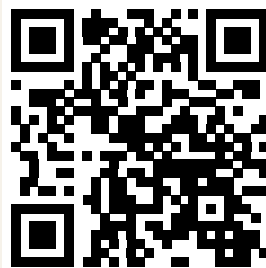
Pengangkatan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 96-97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Sementara itu, Listyo Sigit dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Tunggal Kapolri Pengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 1 Okt, 10.12 WIB



Komjen Suyudi Ario Seto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto menyodorkan nama Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kamis pagi (1/10), Suyudi yang kini menduduki posisi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalani fit and proper test di Komisi III DPR.

Sebagai salah seorang perwira tinggi Polri, Suyudi bukan orang sembarang. Dia merupakan jenderal bintang tiga Polri yang sudah makan asam garam selama bertugas di kepolisian maupun di organisasi luar Polri seperti BNN. Selama perjalanan karirnya, Suyudi pernah menduduki sejumlah posisi strategis.

Sebelum menjadi kepala BNN, Suyudi pernah menjadi Kapolda Banten pada 2024-2025. Dia juga pernah menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023-2024.

Tidak hanya itu, berturut-turut Suyudi pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Kapolres Bogor Kota, Kapolres Bogor, dan Kapolres Majalengka.

Abituren Akademi Kepolisian (Akp) 1994 itu membawa semangat Polri Bersama Masyarakat. Hal itu ditekankan oleh Suyudi dalam fit and proper test di Komisi III DPR.

Dia memastikan bahwa semangat itu bukan sekadar jargon. Melainkan kebijakan yang berorientasi kepada publik.

"Polisi Bersama Masyarakat bukan sekedar jargon yang bukan pengganti grand strategi, renstra, promotor, presisi, atau polmas, dia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan seluruh kebijakan kepada satu orientasi masyarakat," ucap Suyudi.

Secara tegas, Suyudi menyatakan bahwa dirinya tidak ingin jika setiap pergantian kapolri selalu dimaknai sebagai memulai kembali dari nol.

Menurut Suyudi, institusi harus lebih besar dari pada figur pimpinannya. Karena itu, seluruh kebijakan sistem dan program terdahulu yang terbukti baik dan bermanfaat akan dia lanjutkan.

"Saya perkuat dan institusionalisasikan, yang belum optimal akan

saya sempurnakan, yang tumpang tindih akan saya sederhanakan, dan yang menyimpang dari hukum etika serta kepentingan masyarakat akan saya koreksi dengan tegas," ujarnya.

Dari promotor Suyudi berniat mempertahankan semangat profesionalisme, modernisasi pelayanan publik, quick wins, dan manajemen perubahan.

Dari presisi, dia akan melanjutkan pendekatan prediktif, transparansi berkeadilan, digitalisasi pelayanan ETLE, Call Center 110, dumas, serta restorative justice sesuai hukum.

NASIONAL

Sidang Ijazah, Arsul Sani Pertanyakan Kewenangan MK Batalkan Pelantikan Gibran

Oleh Redaksi · 1 Okt, 08.56 WIB



BANDA ACEH - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan kepada ahli yang dihadirkan pemohon terkait kewenangan Mahkamah untuk membatalkan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaan itu disampaikan Arsul dalam sidang gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran di MK, Rabu (30/9/2026) malam.

Arsul menanyakan dasar konstitusional yang dapat digunakan MK apabila nantinya diminta membatalkan pelantikan Gibran.

"Kalau andai-andai harus dipenuhi apa kemudian konstitusional digunakan oleh mahkamah kewenangan diatur UUD maupun UU konstitusi mahkamah dibatalkan pelantikan?" kata Arsul.

Arsul juga menyoroti perbedaan antara diskualifikasi dan impeachment yang disampaikan para ahli dalam persidangan.

"Arah keterangan ahli bedakan diskualifikasi bedakan dengan Impeachment," ujar Arsul.

Selain itu, Arsul mempertanyakan kewenangan MK apabila diminta memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang.

"Bagaimana mahkamah perintahkan MPR selenggarakan sidang apakah bisa demi anggapan keadilan substantif kemudian katakan

konstitusi framework itu harus diterabas, gimana hal seperti ini bisa dijelaskan dalam perspektif ahli," ujarnya.

Dalam sidang pembuktian tersebut, pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni Yance Arizona, Titi Anggraini, dan Bivitri Susanti. Sementara saksi yang dihadirkan adalah I Gusti Putu Artha.

Para ahli dan saksi tersebut kemudian diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.

Gugatan tersebut diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan karena para pemohon mengaku menemukan indikasi awal tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

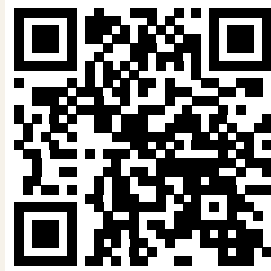
Denny dan para pemohon menilai Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang menjadi salah satu syarat untuk maju dalam Pilpres.

Salah satu petitor yang diajukan yakni meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari kontestasi Pilpres 2024.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Tok! Komisi III DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 1 Okt, 10.08 WIB



BANDA ACEH - Komisi III DPR RI menyepakati Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan peserta rapat terhadap hasil uji kelayakan Suyudi sebagai calon Kapolri.

"Apakah secara aklamasi dapat disetujui?" Kata Habiburokhman. "Seruju," seru peserta rapat.

Sebelumnya, DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) terkait

usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan Kapolri baru. Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai calon Kapolri usulan Presiden.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

"Pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan Ketua DPR. Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Prihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," kata Habiburokhman saat memimpin rapat.

Habiburokhman menyampaikan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI telah membahas surat tersebut. Hasil pembahasan kemudian menugaskan Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan terhadap Suyudi.

"Sesuai dengan baru saja tadi digelar rapat Badan Musyawarah. DPR ini hari ini tanggal 30 tadi menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri," kata Habiburokhman.

"Apakah disepakati, Saudara-saudara? Setuju. Apakah setuju?" tanya Habiburokhman yang langsung disambut seruan setuju dari peserta rapat

NASIONAL

Puan Buka Suara soal Nasib Listyo Sigit Usai Tak Lagi Jadi Kapolri

Oleh Redaksi · 1 Okt, 12.58 WIB



BANDA ACEH -Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bergabung ke dalam kabinet setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri.

Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui pemberhentian Listyo Sigit sekaligus pengangkatan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai peluang Listyo Sigit masuk ke jajaran menteri, Puan menegaskan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Kemudian apakah akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," kata Puan.

Begitu pula saat disinggung mengenai rencana reshuffle kabinet yang dijadwalkan berlangsung sore ini, Puan enggan berkomentar banyak dan meminta awak media

menanyakannya langsung ke Istana.

"Kalau reshuffle nanti tanya ke Presiden, ke Istana," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI telah memproses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri berdasarkan Surat Presiden (Surpres) yang diterima pada 30 September 2026. Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi disetujui sebagai pengganti Listyo Sigit dan dijadwalkan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan agenda reshuffle kabinet sore ini.

NASIONAL

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Oleh Redaksi · 1 Okt, 08.41 WIB



BANDA ACEH -PDIP berpeluang mengajukan sosok untuk mengisi posisi wakil presiden apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, selain nama dari PDIP, kandidat pengganti Gibran menurutnya juga bisa berasal dari Golkar dan PAN yang berada dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.

"Ada mungkin calon ketiga yang mungkin tidak kita duga-duga. Siapa itu? Bisa saja datang dari PDI Perjuangan. Bisa saja," kata Ray dalam diskusi Politik bertajuk 'Karpas Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran'

di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026.

Ray mengaitkan kemungkinan munculnya nama dari PDIP dengan rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Apakah di pertemuan nasi goreng kedua akan dibicarakan soal kira-kira kalau keputusan MK mengabulkan permohonan, maka nama dari PDIP bisa saja muncul," ujar Pengamat Politik jebolan UIN Jakarta ini.

Menurut Ray, kemungkinan tersebut tidak terlepas dari langkah yang disebutkan tengah dipersiapkan lingkaran internal Prabowo untuk menghadapi putusan MK atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan.

"Saya khawatir sebetulnya lingkaran internal Pak Prabowo juga dugaan saya sudah mulai menyusun langkah-langkah bilamana MK mengabulkan permohonan Denny dan kawan-kawan sehingga pertemuan nasi goreng kedua mau dilakukan katanya dalam waktu dekat," pungkasnya.

Permohonan yang meminta diskualifikasi Gibran itu diajukan pada 10 September 2026 dan telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Para pemohon berjumlah 12 orang, terdiri dari sejumlah individu termasuk Denny Indrayana, anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta perwakilan KIPP dan Partai Ummat.

NASIONAL

Listyo Sigit Diberhentikan, DPR: Memang Sudah Waktunya

Oleh Redaksi · 1 Okt, 12.55 WIB



BANDA ACEH -Pemberhentian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri membuat tanda tanya mengenai alasan spesifik di balik keputusan tersebut.

Kendati demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Listyo diberhentikan dengan hormat dan menegaskan bukan karena faktor usia.

Puan menyampaikan hal itu usai Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pemberhentian Listyo dan pengangkatan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo.

"Ya Alhamdulillah baru saja rapat paripurna selesai menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kamis, 1 Oktober 2026.

Saat ditanya wartawan mengenai alasan pemberhentian tersebut, Puan menjawab singkat.

"Dengan terhormat, karena memang sudah waktunya," ujar Puan.

Puan menegaskan usia Listyo bukan alasan pemberhentian.

"Tidak, tidak ada," kata Puan.

Pada rapat paripurna yang sama, DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit. Persetujuan tersebut dilakukan setelah Komisi III DPR menyelesaikan proses fit and proper test dan menyetujui pencalonan Suyudi secara aklamasi.

Puan mengatakan proses tersebut dilakukan sesuai mekanisme setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres). Ia menyebut Surpres terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri diterima DPR pada 30 September 2026.

NASIONAL

Canda Hakim MK di Sidang Gugatan Ijazah Gibran: Kami Nanti Dibully Terus Sama Refly Harun

Oleh Redaksi · 1 Okt, 08.52 WIB



BANDA ACEH - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat sidang gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Rabu (30/9/2026).

Saldi awalnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan keterangan ahli selanjutnya.

Dia kemudian meminta Refly Harun untuk menyampaikan keterangannya.

"Sekali-kali suruh Pak Refly, Pak Bambang, biar kedengaran suaranya," kata Saldi di Ruang Sidang MK, Rabu (30/9/2026).

Saldi kemudian berkelakar Refly Harun tidak diberikan kesempatan berbicara, pihaknya akan terus menjadi sasaran bully.

"Kalau tidak kita nanti di-bully terus sama Pak Refly ini," celetuk Saldi.

"Saya orang baik, Yang Mulia," jawab Refly.

MK menggelar sidang pembuktian gugatan ijazah Gibran pada Rabu (30/9/2026) malam. Ahli yang dihadirkan pemohon yakni Yance Arizona, Titi Anggraini, dan Bivitri Susanti. Sementara saksi yang didatangkan adalah I Gusti Putu Artha. Mereka telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan.

Gugatan tersebut diajukan pakar hukum tata negara Denny Indra-

yana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan karena para pemohon mengaku menemukan indikasi awal tidak terpenuhinya syarat pendidikan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Syarat yang dipersoalkan yakni ketentuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Denny dan para pemohon menilai Gibran tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat yang menjadi syarat untuk maju dalam Pilpres.

Salah satu petitem para pemohon yakni meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari kontestasi Pilpres 2024

NASIONAL

Menko PMK Pratikno Tertawa Respons Isu Kena Reshuffle: Ada-Ada Aja Kamu

Oleh Redaksi · 1 Okt, 13.05 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tertawa merespons kabar dirinya bakal digantikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam reshuffle kabinet. Dia mengaku belum mengetahui isu tersebut.

"Enggak ada, enggak ada. Ya ini kita enggak tahu kok," ujar Pratikno usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dirinya mendapat posisi baru dalam reshuffle, Pratikno kembali tertawa.

"(Tertawa) kamu, ada-ada aja kamu," katanya.

Pratikno kemudian ditanya secara spesifik mengenai kabar posisi Menko PMK akan digantikan Sugiono. Namun, dia kembali menegaskan belum memperoleh informasi mengenai hal tersebut.

"Saya sampai sekarang enggak ada, belum (dapat informasi)," ujar Pratikno.

Sebelumnya, beredar kabar posisi Menko PMK akan diisi oleh Sugiono. Ada pun Sugiono saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu)

Kabar tersebut mencuat di tengah rencana pelantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

NASIONAL

DPR Terima Surpres Pergantian Kapolri

Oleh Redaksi · 1 Okt, 09.56 WIB



BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri usulan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diketahui dalam Rapat Pleno Komisi III DPR terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

"Pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan Ketua DPR, Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat.

Habiburokhman mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah membahas surat tersebut. Hasilnya, Komisi III DPR ditugaskan untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto.

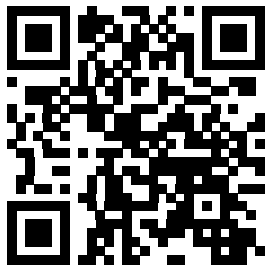
"Sesuai dengan baru saja tadi digelar rapat Badan Musyawarah. DPR ini hari ini tanggal 30 tadi tadi menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri," kata Habiburokhman.

"Apakah disepakati, Saudara-saudara? Setuju. Apakah setuju?" tanya Habiburokhman yang langsung disambut seruan setuju dari peserta rapat

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

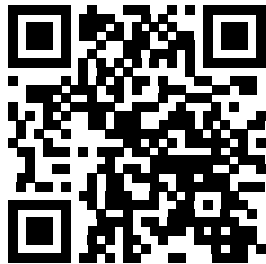
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

6 BERITA

ACEH

Wali Kota Banda Aceh Pimpin Rapat Forkopimda, Bahas Persiapan Muzakarah dan Sejumlah Isu Terkini

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.51 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal memimpin rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sejumlah isu terkini di Kota Kamis (1/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh tersebut membahas langkah antisipasi dan kesiapan pemerintah bersama seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah persiapan menghadapi Muzakarah Internasional Tauhid Sufi ke-II yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.

Kegiatan yang diperkirakan dihadiri sekitar 20.000 hingga 30.000 peserta itu akan berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Balai Meuseuraya Aceh,

Blang Padang, dan Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh.

Persiapan mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan, lalu lintas, kesehatan, kebersihan, hingga akomodasi.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi agenda tersebut.

“Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak dan berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan masyarakat tetap merasa nyaman,” ujar Illiza.

Selain persiapan Muzakarah, Forkopimda juga membahas antisipasi terhadap Milad GAM dengan menekankan deteksi dini, komunikasi, serta koordinasi bersama keuchik dan unsur terkait.

Pengalaman dari kejadian pada 15 Agustus 2026 menjadi bahan evaluasi agar potensi gangguan

keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi lebih awal.

Rapat juga menyoroti persoalan generasi muda, khususnya kasus dugaan perundungan atau bullying dan kekerasan di sekolah serta kenakalan remaja.

Pemerintah menekankan perlunya pengawasan dan pendampingan terhadap anak dengan melibatkan sekolah, orang tua, gampong, kepolisian, Satpol PP dan WH, serta Dinas Perhubungan.

Pada sektor syariat, kesehatan, dan perlindungan masyarakat, rapat turut membahas penanganan HIV/AIDS. Pembahasan mencakup pemetaan populasi berisiko, pemeriksaan, konseling, pengobatan, pendampingan, serta perlindungan kerahasiaan pasien.

Pemko Banda Aceh juga mendorong optimalisasi pos Satpol PP dan WH sebagai pusat pembinaan, pelayanan, dan respons masyarakat. Upaya tersebut melibatkan keuchik, imeum mukim, imam

meunasah, pemuda, orang tua, Dinas Kesehatan, MPU, MAA, serta Forkopimda.

Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca dan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat turut menjadi perhatian.

Pemerintah mengantisipasi potensi hujan lebat, petir, angin kencang, banjir, pohon tumbang, hingga gangguan lalu lintas.

Rapat juga membahas antrean bahan bakar minyak (BBM) serta perkembangan inflasi Kota Banda Aceh yang tercatat sebesar 4,84 persen pada Agustus 2026.

Berbagai pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah bersama unsur Forkopimda untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah berbagai agenda dan persoalan yang dihadapi Kota Banda Aceh.***

ACEH

Kapolda Aceh Terima Silaturahmi Tim Kejaksaan RI

Oleh Redaksi · 1 Okt, 23.35 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di ruang kerjanya, Mapolda Aceh, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan Kejaksaan Agung RI.

“Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum,” kata Joko.

Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Polda Aceh terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh mitra penegak hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan humanis,” ujarnya.[]

ACEH

Wagub Aceh Hadiri Haul ke-38 Abu Tanoh Mirah di Bireuen

Oleh Redaksi · 1 Okt, 13.53 WIB



BANDA ACEH, BIREUEN — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhullah, SE, atau yang akrab disapa Dek Fadh, menghadiri peringatan Haul ke-38 Abu H. Abdullah Hanafie atau yang lebih dikenal dengan Abu Tanoh Mirah, di Kompleks Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Kamis (1/10/2026).

Peringatan haul tersebut turut dihadiri Abon Arongan serta sejumlah ulama kharismatik Aceh. Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti masyarakat serta para santri.

Haul Abu Tanoh Mirah menjadi momentum untuk mengenang kembali sosok ulama yang memiliki peran dalam pendidikan dan pengembangan syiar Islam di Aceh.

Keteladanan dan pengabdian beliau terus dikenang masyarakat serta menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan pendidikan dayah di Aceh.

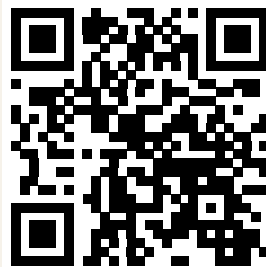
Kehadiran Dek Fadh dalam kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan Pemerintah Aceh terhadap ulama dan tradisi keilmuan Islam yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Aceh.

Peringatan haul diisi dengan rangkaian kegiatan keagamaan dan doa bersama untuk mengenang jasa serta mendoakan Abu H. Abdullah Hanafie. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi antara ulama, pemerintah, santri, dan masyarakat.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

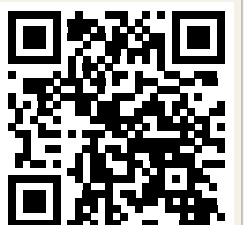
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Aceh Besar Raih Nilai IPKD Tertinggi dan Predikat Baik se-Aceh

Oleh Redaksi · 1 Okt, 08.51 WIB



BANDA ACEH, KOTA JANTHO — Kabupaten Aceh Besar menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang meraih predikat “Baik” sekaligus nilai tertinggi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 dengan tahun ukur 2025.

Aceh Besar memperoleh skor 80,379 dalam kategori kapasitas fiskal rendah dan ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Pengelola Keuangan Berpredikat “Baik”.

Penghargaan tersebut ditandatangani Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 15 September 2026. Penghargaan diserahkan Kepala Bappeda Aceh melalui Plt Sekretaris Bappeda Aceh Mahdinarmansyah kepada Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang diwakili Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni.

Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Pengelolaan Keuangan

Daerah (IPKD) Tahun 2024, Tahun Ukur 2025 di Aula Prof. Madjid Ibrahim, Kantor Bappeda Aceh, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (BSKDN), Rochayati Basra, serta para kepala Bappeda dan kepala BPKD se-Aceh.

Hasil Penilaian BSKDN

Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penilaian BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil pengukuran, Aceh Besar menjadi daerah dengan nilai tertinggi sekaligus satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang memperoleh predikat “Baik”.

“Alhamdulillah, Aceh Besar mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Pengelola

Keuangan Berpredikat ‘Baik’ dengan skor 80,379 dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Ini merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak,” kata Agus.

Menurut dia, skor tersebut menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, kategori kapasitas fiskal rendah menunjukkan ruang gerak keuangan daerah yang masih terbatas karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Agus mengatakan penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Enam Dimensi Penilaian

IPKD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indeks tersebut memberi-

kan gambaran mengenai pengelolaan keuangan publik mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Penilaian IPKD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 dan dilakukan berdasarkan enam dimensi.

Keenam dimensi tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh mengikuti pengukuran IPKD secara berkala. Bappeda Aceh juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, seperti bimbingan teknis pengisian data, rapat koordinasi, evaluasi, hingga pengumuman hasil pengukuran IPKD.[]

ACEH

Pemko Sabang Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Perkuat Semangat Persatuan

Oleh Redaksi · 1 Okt, 15.49 WIB



BANDA ACEH, SABANG – Pemerintah Kota Sabang kembali meneguhkan semangat menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, peringatan tersebut ditandai dengan upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Sabang, Kamis (1/10).

Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Nourman, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut diikuti seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Usai upacara, Andri mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk

dalam menjalankan tugas sebagai aparatur, bagaimana kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kinerja, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, semangat persatuan dan gotong royong juga perlu terus dijaga dalam mendukung pembangunan di Kota Sabang. Perbedaan latar belakang maupun pandangan, kata dia, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun daerah secara bersama-sama.

“Kita tentu punya latar belakang dan pandangan yang berbeda, tetapi itu jangan menjadi penghalang untuk bekerja bersama. Dengan kebersamaan dan gotong royong, kinerja pemerintahan bisa berjalan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Andri.

Andri berharap semangat yang terkandung dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Dengan demikian, persatuan dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan dalam pembangunan Kota Sabang.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

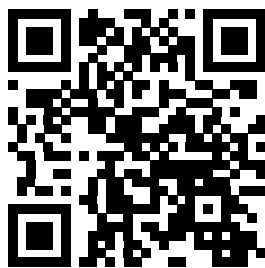
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Plt Sekda Aceh Ingatkan Penerapan Nilai Pancasila dalam Pelayanan

Oleh Redaksi · 1 Okt, 12.53 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (1/10/2026).
Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan umum kepada inspektur upacara, laporan komandan upacara, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila, serta pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

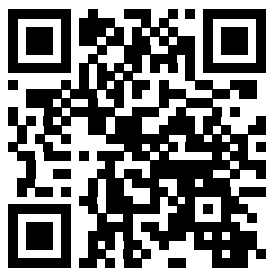
Selanjutnya, dilakukan pembacaan Naskah Ikrar dan Naskah Doa. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan laporan komandan upacara dan penghormatan umum kepada inspektur upacara.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Dalam kesempatan tersebut, Taufik mengingatkan jajaran Pemerintah Aceh agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada sere-

moni, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pancasila harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufik.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi jajaran Pemerintah Aceh untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara sekaligus memperkuat persatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Aceh.***

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

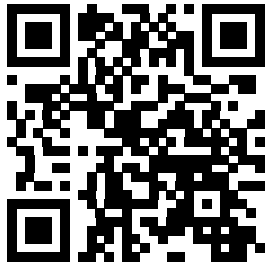
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LIFESTYLE

4 BERITA

LIFESTYLE

Double Job! Kekayaan Bahlil Tembus Rp344,41 Miliar

Oleh Redaksi · 1 Okt, 16.57 WIB



BANDA ACEH -Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis, 1 Oktober 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dengan jabatan baru tersebut, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri ESDM.

Di balik jabatan barunya, Bahlil tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp344.415.518.982 (Rp344,41 miliar) sebagaimana dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025.

LHKPN tersebut disampaikan Bahlil pada 31 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap. Dalam laporan itu, Bahlil tercatat sebagai Menteri ESDM.

Harta Bahlil didominasi kepemilikan tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp322.381.257.825 (Rp322,38

miliar). Total tersebut berasal dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, Sragen, dan Sleman.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 717/164 meter persegi di Jayapura senilai Rp11,11 miliar. Kemudian tanah dan bangunan seluas 278/400 meter persegi di Jayapura senilai Rp4.953.860.625 (Rp4,95 miliar), tanah dan bangunan seluas 1.600/1.500 meter persegi di Jayapura senilai Rp45,9 miliar, serta tanah seluas 509 meter persegi di Jayapura senilai Rp22,95 miliar.

Bahlil juga melaporkan tanah dan bangunan seluas 112/300 meter persegi di Jayapura senilai Rp5,871 miliar, dan tanah dan bangunan seluas 120/300 meter persegi di wilayah yang sama senilai Rp5,871 miliar.

Berikutnya, tanah dan bangunan seluas 424/1.200 meter persegi di Jayapura senilai Rp46,8 miliar, serta tanah dan bangunan seluas

2.000/1.500 meter persegi di Gianyar senilai Rp53,55 miliar.

Masih di Jayapura, Bahlil melaporkan tanah seluas 2.490 meter persegi senilai Rp1.654.862.275 (Rp1,65 miliar), tanah seluas 939 meter persegi senilai Rp1.124.660.250 (Rp1,12 miliar), tanah seluas 2.490 meter persegi senilai Rp1.670.923.800 (Rp1,67 miliar), tanah seluas 3.500 meter persegi senilai Rp830.106.375 (Rp830,1 juta), dan tanah seluas 1.350 meter persegi senilai Rp17,34 miliar.

Sementara di Jakarta Selatan, terdapat tanah dan bangunan seluas 420/600 meter persegi senilai Rp35,36 miliar, dan tanah dan bangunan seluas 579/800 meter persegi senilai Rp46,8 miliar.

Bahlil juga memiliki tanah dan bangunan seluas 750/1.200 meter persegi di Jayapura senilai Rp11.250.844.500 (Rp11,25 miliar), serta tanah dan bangunan seluas 68/195 meter persegi di Jayapura senilai Rp7,744 miliar.

Dua aset lainnya yakni tanah seluas 335 meter persegi di Sragen senilai Rp550 juta, dan tanah seluas 335 meter persegi di Sleman senilai Rp1,05 miliar.

Selain tanah dan bangunan, Bahlil tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp75.276 juta. Aset tersebut terdiri dari satu unit Toyota Harrier tahun 2007 senilai Rp44,217 juta, dan satu unit Honda CR-V tahun 2010 senilai Rp31,059 juta. Keduanya tercatat sebagai hasil sendiri.

Bahlil juga melaporkan surat berharga senilai Rp1.612.500.000 (Rp1,61 miliar), serta kas dan setara kas Rp20.346.485.157 (Rp20,34 miliar).

Dalam LHKPN 2025, tidak terdapat nilai yang dilaporkan untuk harta bergerak lainnya maupun harta lainnya. Bahlil juga tidak mencatat adanya utang.

LIFESTYLE

Menlu Arrmanatha Nasir Tercatat Memiliki Harta Kekayaan Mencapai Rp16,26 Miliar

Oleh Redaksi · 1 Okt, 17.22 WIB



BANDA ACEH -Arrmanatha Christiawan Nasir alias Tata resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis, 1 Oktober 2026. Sebelumnya, Arrmanatha menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.

Berdasarkan penelusuran RMOL di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arrmanatha tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp16.269.281.934 (Rp16,26 miliar) berdasarkan LHKPN periodik 2025.

LHKPN tersebut disampaikan pada 31 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap. Dalam laporan itu, Arrmanatha tercatat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Harta Arrmanatha didominasi tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp11.799.524.000 (Rp11,79 miliar).

Dalam LHKPN tersebut, Arrmanatha melaporkan tanah dan bangunan seluas 50/100 meter persegi di Bogor senilai Rp500 juta, tanah seluas 788 meter per-

segi di Jakarta Selatan senilai Rp9.080.124.000 (Rp9,08 miliar), tanah seluas 6.000 meter persegi di Bogor senilai Rp1,2 miliar, tanah seluas 3.000 meter persegi di Bogor senilai Rp600 juta, tanah seluas 1.722 meter persegi di Bogor senilai Rp344,4 juta, serta tanah seluas 2.500 meter persegi di Bogor senilai Rp75 juta.

Selain tanah dan bangunan, Arrmanatha memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1.786.450.000 (Rp1,78 miliar). Aset tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Scoopy tahun 2014 senilai Rp5 juta, dan mobil Land Rover Defender tahun 2015 senilai Rp1.781.450.000 (Rp1,78 miliar). Keduanya tercatat sebagai hasil sendiri.

Arrmanatha juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp166 juta, surat berharga Rp2.033.310.555 (Rp2,03 miliar), serta kas dan setara kas sebesar Rp483.997.379 (Rp483,99 juta).

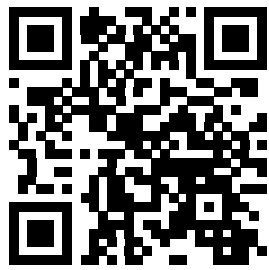
Sementara itu, tidak terdapat nilai yang dilaporkan untuk harta lainnya.

Dalam LHKPN 2025, Arrmanatha juga tidak mencantumkan utang. Dengan demikian, total harta sebesar Rp16.269.281.934 (Rp16,26 miliar).

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LIFESTYLE

Jenderal Suyudi Ario Seto Kapolri Baru Ternyata Pernah Jadi Cover Boy Tahun 1988, Ini Fotonya!

Oleh Redaksi · 1 Okt, 17.11 WIB



BANDA ACEH - Nama Suyudi Ario Seto mendadak viral di media sosial usai diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dan sebelum menjabat sebagai Kapolri, Suyudi Ario Seto mengemban sejumlah jabatan penting, termasuk kepala BNN periode Agustus 2025 hingga Oktober 2026 maupun Kapolda Banten periode Juni 2024 hingga Agustus 2025.

Terlepas dari itu, siapa sangka kalau Suyudi Ario Seto ternyata

pernah menjadi cover majalah. Fakta ini diungkap netizen di media sosial.

Bukti wajah Suyudi Ario Seto muncul di majalah Mode pun diungkap akun Instagram @koleksigoeni. Unggahan Instagram tanggal 11 Oktober 2024 menjadi buktinya.

Unggahan itu menjelaskan bahwa majalah Mode edisi 30 Mei 1988 menampilkan wajah-wajah semifinalis Cover Boy Mode. Dan, Suyudi ada di nomor 22.

Tertera di sana wajah Suyudi saat masih muda. Informasi yang tersedia di majalah itu adalah nama Suyudi Ario Seto, status



pelajar SMPN 70 Jakarta, dan di foto itu dia berusia 18 tahun.

Redaksi majalah juga mencatat tinggi Suyudi kala itu 171 cm dengan berat badan 52 kg.

Pada keterangan majalah, tertulis:

"Cover Boy '88. Redaksi menerima 8345 pelamar sejak dikeluarkannya formulir Cover Boy '88. Sungguh pekerjaan yang tidak ringan - bukan hanya untuk para juri yang menilai - sejak dari membuka amplop berisi formulir dan foto-foto (yang dilakukan oleh bagian Sekretariat), mendaftarnya satu per satu sampai membaca prestasi serta memandangi foto-

foto dari berbagai sudut dan bermacam ekspresi.

Walaupun melelahkan, tetapi kami gembira sekali melihat partisipasi pembaca yang dengan susah payah telah 'menjawab' ajakan kami. Kepada kamu-kamu yang telah mengirim formulir dan kali ini belum berhasil, kami mengucapkan inilah ke 60 semifinalis yang terpilih tahun ini.

Kepada kamu yang namanya ada di sini, Redaksi Mode mengucapkan selamat."

Sebagai informasi, Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) angkatan 1994 dan memiliki rekam jejak panjang di bidang reserve

LIFESTYLE

Harta Kekayaan Jenderal Suyudi Ario Seto Tembus Rp5,847 Miliar

Oleh Redaksi · 1 Okt, 17.01 WIB



BANDA ACEH - Jenderal Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Sebelum dipercaya memimpin Korps Bhayangkara, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat berpangkat jenderal bintang tiga.

Berdasarkan penelusuran RMOL di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip HARIANACEH.co.id, Suyudi memiliki total harta kekayaan Rp5,847 miliar pada LHKPN periodik 2025.

LHKPN tersebut disampaikan Suyudi pada 28 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap. Dalam laporan itu, Suyudi tercatat sebagai Kepala BNN pada bidang eksekutif.

Dari total harta Rp5,847 miliar tersebut, komponen terbesar berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp4,6 miliar yang bersumber dari hibah tanpa akta.

Suyudi melaporkan dua aset tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Jakarta Selatan. Pertama, tanah dan bangunan seluas 176/225 meter persegi senilai Rp2,4 miliar.

Kedua, tanah dan bangunan seluas 162/210 meter persegi dengan nilai Rp2,2 miliar.

Selain properti, Suyudi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp457 juta. Rinciannya yakni sepeda motor Yamaha NMA AT tahun 2025 senilai Rp27 juta yang tercatat sebagai hasil sendiri.

Kemudian mobil Mini Cooper/Minibus tahun 2022 senilai Rp430 juta yang tercatat diperoleh melalui hibah tanpa akta.

Suyudi juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp40 juta, serta kas dan setara kas Rp750 juta.

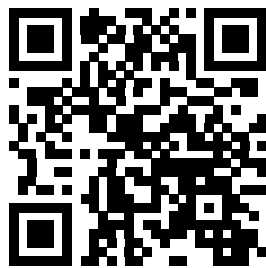
Sementara untuk surat berharga dan harta lainnya, Suyudi tercatat tidak memiliki atau tidak melaporkannya dalam LHKPN periode 2025.

Dalam laporan tersebut, Suyudi juga tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta sebesar Rp5,847 miliar.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

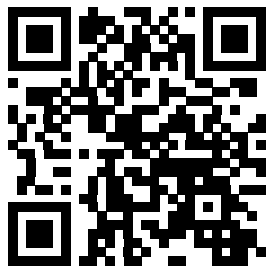
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

5 BERITA

SPORT

Indonesia Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Hajar Bangladesh 9-2

Oleh Redaksi · 1 Okt, 21.41 WIB



BANDA ACEH, JAKARTA – Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Mitchell Baker menjadi bintang kemenangan Indonesia dengan mencetak lima gol. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks.

Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-11 setelah Ole Romeny mengirim umpan dari sisi kanan yang diselesaikan Baker melalui tendangan mendatar ke pojok bawah gawang Bangladesh.

Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Bangladesh, penyerang Indonesia itu melepaskan

penyelesaian dari jarak dekat untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Tekanan Indonesia terus berlanjut. Pada menit ke-32, Rizky Ridho memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang di sudut bawah gawang Bangladesh.

Bangladesh sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-36 melalui sundulan Shahriar Emon. Namun, Indonesia hanya membutuhkan waktu dua menit untuk kembali memperlebar jarak.

Baker mencetak gol ketiganya setelah menerima umpan Romeny. Tiga menit sebelum turun minum, Baker kembali menjebol gawang Bangladesh melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Justin Hubner.

Justin Hubner kemudian membawa Indonesia unggul 6-1 pada masa injury time babak pertama. Ia menyelesaikan sepak pojok Calvin Verdonk dengan sundulan.

Indonesia memasuki babak kedua dengan keunggulan lima gol. Kiper Bangladesh, Mehedi Hasan Srabon, beberapa kali menggagalkan peluang Indonesia, termasuk tendangan Baker dan Romeny.

Pada menit ke-75, Srabon kembali melakukan penyelamatan setelah menggagalkan sundulan Elkan Baggott dari jarak dekat.

Romeny sempat mencetak gol pada menit ke-84, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside.

Indonesia baru kembali menambah gol pada menit ke-90 melalui Luke Vickery. Ia memanfaatkan umpan Romeny untuk mengubah skor menjadi 7-1.

Bangladesh kemudian mencetak gol keduanya melalui Farhaan Ali Wahid yang memaksimalkan umpan Rakib Hossain.

Indonesia belum berhenti menyerang. Kevin Diks mencetak gol kedelapan pada menit ke-90+6. Satu menit berselang, Baker melengkapi penampilan

gemilangnya dengan gol kelima sekaligus memastikan kemenangan Indonesia 9-2.

Hasil tersebut membuat Indonesia finis di puncak Grup A dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. Indonesia unggul produktivitas gol atas Malaysia yang juga mengoleksi tujuh poin dan selisih gol +9.

Dengan menjadi juara Grup A, Indonesia berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Susunan Pemain

Indonesia: Emil Audero, Calvin Verdonk, Rizky Ridho (Luke Vickery 60'), Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner (James 73'), Ragnar Oratmangoen (Vikri 73'), Ole Romeny, Mitchell Baker.

Bangladesh: Mehedi Hasan Srabon, Saad Uddin, Zidane Yousuf, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Shuki Itofusa (Ali Wahid 46'), Hamza Choudhury, Jamal Bhuyan, Rakib Hossain, Shomit Shome (Rana 27'), Shahriar Emon (Shadin 46').[]

OPINI

Dari Cot Iri ke Lompok: Skripsi Tertunda Karena Stang Motor Bangkok

Oleh Syarifudin Brutu · 1 Okt, 20.41 WIB



Ilustrasi: Jalan panjang menuju gerbang kampus di ujung cakrawala, aspalnya dipenuhi lubang yang berbentuk tanda tanya. Seorang pengendara motor kecil meliuk sendirian menghindari

Saya bukan mahasiswa hukum. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kesehariannya lebih akrab dengan diksi dan tata bahasa ketimbang pasal dan ayat. Tapi justru dari situlah tulisan ini bermula—dari rasa heran kenapa pengetahuan sesederhana "jalan rusak bisa dituntut secara hukum" terasa begitu asing bagi kebanyakan orang di sekitar saya, padahal yang merasakan akibatnya setiap hari bukan cuma ahli hukum, tapi semua orang yang lewat jalan itu, termasuk saya sendiri.

Setiap pagi, ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala menempuh rute yang sama menuju Darussalam. Dan hampir setiap pagi pula, ritualnya serupa: mengerem mendadak, membanting setir, menghindari lubang yang muncul tiba-tiba di tengah jalan. Saya tinggal di Banda Aceh, bukan di jalur lintas provinsi yang sering jadi sorotan nasional. Tapi jalan menuju kampus saya sendiri pun tak kalah menyedihkan kondisinya. Dan setiap kali saya cerita soal ini ke teman-teman sesama mahasiswa jurusan non-hukum, reaksinya nyaris selalu sama: "Memang bisa dituntut?"

Itulah persoalan sesungguhnya. Bukan cuma jalan yang rusak, tapi juga informasi hukum yang semestinya jadi hak semua warga negara justru terasa eksklusif—seolah hanya layak dipahami mahasiswa Fakultas Hukum atau para praktisi di pengadilan. Padahal korban jalan rusak datang dari semua jurusan, semua profesi, semua latar belakang.

Kasus paling nyata ada di depan mata kita sendiri: ruas jalan Lompok (Kecamatan Darussalam)—Cot Iri (Kecamatan Kuta Baro), Aceh Besar. Jalur ini bukan jalan kecil—ia menjadi penghubung vital bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar yang

hendak menuju kawasan pendidikan tinggi di Darussalam, tempat Unsyiah dan beberapa kampus lain berdiri. Kerusakannya begitu parah hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus turun tangan melakukan penanganan darurat, setelah warga mengeluhkan kondisi jalan yang kerap memicu kecelakaan.

Yang membuat saya geram, persoalan ini bukan hal baru. Sejak 2013 hingga 2017, ruas jalan itu sempat ditangani Pemerintah Aceh. Bupati Aceh Besar bahkan sudah mengirim surat permohonan rekonstruksi ke Pemerintah Aceh sejak 2022, sebelum akhirnya status ruas jalan itu baru ditetapkan sebagai jalan provinsi lewat SK Gubernur pada 2024. Artinya, mahasiswa yang hari ini masih menghindari lubang di jalur itu sebenarnya mewarisi persoalan yang sudah mengendap lebih dari satu dekade dalam surat-menyurat birokrasi—dan selama itu pula, nyaris tak ada yang tahu bahwa diamnya pemerintah ini sebetulnya punya konsekuensi hukum yang jelas.

Sebagai orang yang juga baru "melek" soal ini, izinkan saya menjelaskan dengan bahasa paling sederhana yang saya bisa—bukan bahasa pengadilan, tapi bahasa yang mestinya dipahami siapa pun yang pernah jatuh atau hampir celaka karena lubang di jalan.

Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menegaskan bahwa penyelenggara jalan—pemerintah daerah untuk jalan provinsi, pemerintah pusat lewat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk jalan nasional—wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

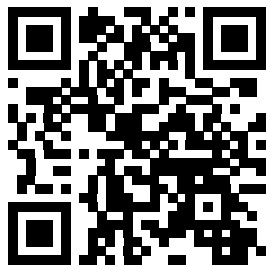
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



IN-DEPTH

Racun di Ujung Keran: Kontaminasi Merkuri dari Tambang Ilegal Jalin ke Air PDAM

Oleh Redaksi · 1 Okt, 15.00 WIB



Ilustrasi Kawasan tambang ilegal dengan ekskavator dan aliran limbah berwarna kuning-hijau di lereng bukit tropis (kiri). Bangunan intake PDAM di tepi Sungai Krueng Aceh dengan air yang terkontaminasi (tengah). Keran air rumah tangga dengan efek kaca pembesar yang menunjukkan simbol racun (tengkorak) di dalam tetesan air (kanan). FOTO/AI untuk HAI.

AGI ratusan ribu penduduk di Banda Aceh dan Aceh Besar, memutar keran air dan membiarkan air mengalir deras dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah rutinitas yang dianggap sebagai jaminan kebersihan dan kesehatan.

PDAM Banda Aceh dan PDAM Aceh Besar telah lama menjadi urat nadi kehidupan, menyuplai air bersih yang diambil dari sumber utama: Sungai Krueng Aceh dan anak-anak sungainya.

Namun, di balik kejernihan air yang keluar dari ujung keran, tersimpan sebuah bom waktu ekologis dan kesehatan yang perlahan namun pasti sedang meracuni masyarakat.

Ilusi Air Bersih di Ujung Jari

Krisis ini bukanlah fiksi ilmiah, melainkan realita pahit yang mengintai dari hulu. Selama bertahun-tahun, kawasan Jalin di Kabupaten Aceh Besar telah menjadi episentrum pertambangan emas ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI).

Dugaan aktivitas ekstraksi emas di wilayah ini, yang dilakukan secara masif dan tanpa ampun terhadap alam, mengandalkan penggunaan merkuri (Hg).

Racun berat ini tidak tinggal diam di lokasi tambang; ia larut, terbawa arus hujan, meresap ke dalam tanah, dan pada akhirnya bermuara ke dalam sistem tata air Krueng Aceh—sumber baku utama bagi PDAM yang melayani ratusan ribu jiwa di kota dan kabupaten.

Tulisan ini akan mengupas secara mendalam anatomi krisis kontaminasi merkuri di Aceh, menelusuri jalur racun dari lubang-lubang tambang ilegal di Jalin hingga ke intake PDAM, menganalisis sorotan media arus utama nasional dan internasional, serta membongkar paradoks penegakan hukum yang membiarkan krisis ini terus berlangsung.

Episentrum Racun: Realita Pertambangan Emas di Jalin

Kecamatan Jalin di Kabupaten Aceh Besar secara geografis

merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan yang kaya akan deposit mineral, termasuk emas.

Selama lebih dari satu dekade, wilayah ini menjadi magnet bagi para penambang skala kecil, baik warga lokal maupun pendatang dari luar provinsi.

Karena ketiadaan modal untuk teknologi ekstraksi yang aman dan modern, para penambang ini menggunakan metode amalgamasi tradisional.

Dalam proses amalgamasi, batuan bijih emas yang telah dihancurkan dicampur dengan air dan merkuri cair. Merkuri memiliki sifat kimia yang mengikat partikel emas, membentuk amalgam.

Campuran ini kemudian dipanaskan menggunakan obor atau tungku sederhana untuk menguapkan merkuri, menyisakan bongkahan emas murni.

Masalah fatal dari metode ini adalah efisiensi yang sangat rendah. Hanya sebagian kecil merkuri yang berhasil mengikat emas; sisanya—dalam jumlah yang masif—terbuang bersama lumpur

dan tailing (limbah tambang) langsung ke sungai-sungai kecil di sekitar Jalin.

Tidak ada kolam pengendap tailing, tidak ada liner anti-bocor, dan tidak ada pengolahan limbah. Hutan di hulu Krueng Aceh digunduli, struktur tanah hancur, dan sungai-sungai berubah warna menjadi keruh kecokelatan.

Yang lebih mengerikan, merkuri yang dibuang ke lingkungan tidak hilang. Melalui proses mikrobiologis di dasar sungai dan sediment, merkuri anorganik bertransformasi menjadi metilmerkuri (methylmercury), bentuk organik yang jauh lebih toksik, mudah larut dalam air, dan memiliki kemampuan bioakumulasi serta biomagnifikasi yang tinggi dalam rantai makanan.

Jalur Maut Dari Tailing Tambang ke Intake PDAM

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

SYARIAH

Bank Aceh Peduli Salurkan Bantuan Tangan Palsu untuk Suhairi di Montasik

Oleh Redaksi · 1 Okt, 15.00 WIB



Bank Aceh Syariah melalui program Bank Aceh Peduli menyalurkan bantuan alat bantu tangan palsu kepada Suhairi, warga Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Bantuan tersebut diserahkan

ACEH BESAR - Bank Aceh Syariah melalui program Bank Aceh Peduli kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan alat bantu berupa tangan palsu kepada Suhairi, salah seorang warga Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Ilham Novrizal, pada Senin (28/9/2026).

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa bantuan tangan palsu tersebut merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus bagian dari upaya memberikan manfaat sosial secara langsung.

“Melalui program Bank Aceh Peduli, kami kembali menyalurkan bantuan alat bantu berupa tangan palsu kepada salah satu warga di Kecamatan Montasik, Aceh Besar,” ujar Fadhil Ilyas.

Menurut Fadhil, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para penyandang disabilitas agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman serta mendukung kemandirian dalam beraktivitas.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi penyemangat bagi penerima dan keluarganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat

dan menjadi bagian kecil dari ikhtiar untuk menghadirkan kemudahan serta semangat bagi penerima dan keluarga,” demikian disampaikan Fadhil.

Komitmen Bank Aceh terhadap Kepedulian Sosial

Penyaluran bantuan tangan palsu kepada Suhairi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Aceh Syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas memiliki arti penting, tidak hanya dalam menunjang kebutuhan fisik, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri, memperluas kesempatan beraktivitas, serta mendorong kemandirian penerima manfaat.

Melalui program Bank Aceh Peduli, Bank Aceh berupaya memperkuat peran sosial perusahaan agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif.

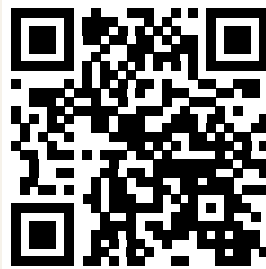
Dengan adanya bantuan tersebut, Suhairi diharapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman serta memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dan berpartisipasi di tengah masyarakat.

Program Bank Aceh Peduli diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Bank Aceh Syariah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat Aceh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

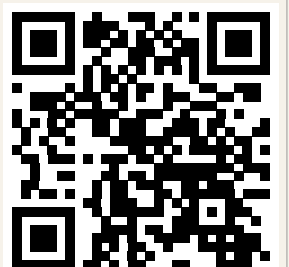
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Detik-detik Mengerikan Flydubai: Pilot Ditikam, Pesawat Menukik, Penumpang Terobos Kokpit

Oleh Redaksi · 1 Okt, 10.17 WIB



BANDA ACEH -- Penerbangan Flydubai FZ1073 dari Dubai menuju Tel Aviv berubah menjadi situasi mencekam pada Rabu (30/9/2026).

Pesawat yang membawa lebih dari 170 penumpang, mayoritas warga Israel, tiba-tiba mengirimkan sinyal darurat ketika tengah melintasi kawasan antara Arab Saudi dan Yordania.

Di dalam kokpit, dua pilot dilaporkan terlibat insiden kekerasan. Salah seorang pilot disebut menikam pilot lainnya. Pesawat kemudian mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga memicu kekhawatiran adanya pembajakan.

Berikut kronologi kejadian yang berakhir dengan pendaratan darurat di Tabuk, Arab Saudi.

Pesawat Flydubai FZ1073 berangkat dari Bandara Internasional Dubai sekitar pukul 03.05 GMT atau sekitar 07.05 waktu setempat. Pesawat Boeing 737 tersebut kemudian menanjak hingga

mencapai ketinggian jelajah sekitar 34.000 kaki.

Sekitar dua jam setelah lepas landas, situasi berubah.

Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat mulai mengalami penurunan ketinggian yang tidak biasa. Pada sekitar pukul 05.21 GMT, pesawat mengalami penurunan tajam, kemudian sempat kembali menanjak sebelum kembali turun secara drastis.

Tidak lama kemudian, sekitar pukul 05.28 GMT, transponder pesawat mengirimkan kode 7700. Dalam penerbangan sipil, kode tersebut merupakan sinyal keadaan darurat umum.

Situasi semakin serius sekitar enam menit kemudian.

Pada pukul 05.35 GMT, kode transponder berubah menjadi 7500. Kode tersebut merupakan sinyal internasional yang digunakan untuk menunjukkan adanya gangguan atau intervensi melawan hukum terhadap sebuah pesawat.

Perubahan kode itulah yang memicu kekhawatiran bahwa FZ1073 sedang dibajak.

Di tengah kepanikan tersebut, laporan mengenai apa yang terjadi di kokpit mulai terungkap.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan salah seorang pilot menyerang dan menikam pilot lainnya. Pilot yang terluka disebut masih berusaha membuka akses ke kokpit sehingga penumpang dan awak pesawat dapat masuk.

Laporan saksi mata menyebut pesawat sempat menukik tajam. Ketinggiannya dilaporkan turun sekitar 16.000 hingga 17.000 kaki dalam waktu sekitar dua menit.

Situasi tersebut membuat penumpang panik.

Seorang penumpang bernama Yaniv Hayoun mengatakan dirinya bersama penumpang lain berusaha menuju bagian depan pesawat setelah menyadari terjadi sesuatu di kokpit.

Ketika pintu kokpit terbuka, mereka melihat pilot yang terluka dan pilot lain berada di dalam.

Menurut kesaksiannya, pilot yang diduga menyerang rekannya berada di sekitar panel kendali pesawat.

Hayoun kemudian menerobos masuk dan membantu melumpuhkan pilot tersebut.

"Saya berteriak kepada mereka untuk lari dan mengambil kendali pesawat," kata seorang penumpang dalam kesaksiannya mengenai situasi tersebut.

Dalam laporan Reuters, Hayoun juga menceritakan bagaimana dirinya berusaha menahan penyerang dan menariknya menjauh dari panel kendali. Setelah itu, awak pesawat lain mengambil alih kendali penerbangan.

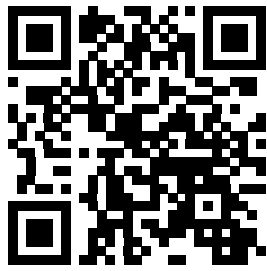
Kondisi pesawat saat itu masih belum sepenuhnya terkendali.

Pesawat sempat berbelok dan memasuki wilayah udara Yordania sebelum kembali mengarah ke Arab Saudi.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia